

**ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO DI SULAWESI TENGGARA**

**Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through
microenterprise development in South East Sulawesi**

MUH. YANI BALAKA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS PENGARUH KREDIT MIKRO TERHADAP PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DI SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. YANI BALAKA
Nomor Pokok: P050030105

**Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Disertasi
Pada tanggal 31 Mei 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Menyetujui

Komisi penasehat,

Prof. Dr. H. M. Yusuf Abadi, M.S.
Promotor

Dr. I Made Benyamin, M.Ec
Ko-Promotor

Dr. H. Marsuki, DEA
Ko-Promotor

**Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi,**

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,**

Prof. Dr. H. M. Yunus Zain, M.A. Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Gagasan mendasar penyusunan disertasi ini adalah dari hasil pengamatan layanan keuangan mikro terhadap usaha mikro mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro, dan selanjutnya memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Sebagaimana diketahui, bahwa kondisi riil dilapangan umumnya usaha mikro sukar untuk berkembang akibat keterbatasan yang mereka miliki, seperti keterbatasan modal usaha dan juga karena akses terhadap lembaga keuangan formal sangat terbatas, karena dianggap tidak *bankable*.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan disertasi ini. Namun dengan bantuan berbagai pihak, maka disertasi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana UNHAS, Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc., beserta jajarannya, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian studi dan penyusunan disertasi ini.

2. Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Pascasarjana UNHAS, Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA., yang telah memberikan perhatian, dukungan dan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Promotor, Prof. Dr. H. Muh. Yusuf Abadi, MS., dengan penuh perhatian telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan, bimbingan dan inspirasi bagi penyelesaian studi penulis.
4. Ko-Promotor, Dr. I Made Benyamin, M.Ec. dan Dr. H. Marsuki, DEA, yang sejak awal proses, penelitian dan penyusunan disertasi telah memberikan inspirasi, dorongan semangat dan bimbingan, sampai selesainya penulisan disertasi ini.
5. Para penguji: Prof. Dr. H. Latanro, Prof. Dr. H. A. Karim Saleh, Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA., Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA., Dr. M. M. Papayungan, MA., Dr. Hj. Rahmatia, MA., yang telah memberikan banyak tambahan ilmu pengetahuan dan masukan dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Rektor Universitas Haluoleo dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan program doktor di Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Dr. Syamsuddin, MT., Drs. Hisyam Ihsan, MS., Muh. Syarif, SE., MS. Endro Sukoco, SE., MS. Dan Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana

UNHAS khususnya program pendidikan Doktor (S3), program studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

8. Kedua orang tua penulis Ayahanda H. Djuhaepa Balaka dan Ibunda Hj Subaedah, yang tidak henti-hentinya mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak yang berguna, dan dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Segenap keluarga, khususnya kepada istri penulis Isnaniah, anak-anak penulis Reskiani Astri Balaka dan Nurdiana Sintia Balaka. Yang telah memberikan dorongan moril dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian disertasi ini.

Semoga bantuan yang diberikan mendapat limpahan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Amiin.

Makassar, Mei 2007

Muh. Yani Balaka

ABSTRAK

Muh. Yani Balaka. “*Analisis pengaruh kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro di Sulawesi Tenggara*”. (dibimbing oleh: **H. Muh. Yusuf Abadi** sebagai promotor, **I Made Benyamin** dan **H. Marsuki** sebagai ko-promotor).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh jumlah kredit mikro terhadap kapasitas usaha mikro di Sulawesi Tenggara; 2) pengaruh kapasitas usaha mikro terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara; dan 3) pengaruh jumlah kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Tenggara pada empat kantor cabang bank BRI yaitu cabang Kendari, Bau-Bau, Raha, dan Kolaka. Metode penelitian ini adalah penelitian Survey. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah kredit mikro bank BRI di Sulawesi Tenggara. Pengambilan sampel dilakukan secara aksidental, dengan jumlah sampel sebesar 200 responden. Metode analisis yang digunakan adalah dengan *Structural Equation Model* (SEM), pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 12.0 dan AMOS 5.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) jumlah kredit mikro mempunyai pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap kapasitas usaha mikro di Sulawesi Tenggara; 2) kapasitas usaha mikro mempunyai pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara; dan 3) jumlah kredit mikro tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Kredit mikro, pengentasan kemiskinan, usaha mikro

ABSTRACT

Muh. Yani Balaka, *“Analysis of microcredit effect on poverty alleviation through microenterprise development in South East Sulawesi”* (Supervised by **H. Muh. Yusuf Abadi** as promoter, **I Made Benyamin** and **H. Marsuki** as co-promoter).

The aims of the research are to analyze 1) the effect of microcredit to the capacity of microenterprise in South East Sulawesi, 2) the effect of capacity of microenterprise on poverty alleviation in South East Sulawesi, 3) the effect of microcredit on poverty alleviation in South East Sulawesi.

The research was conducted in South East Sulawesi at four BRI branches, namely in Kendari, Kolaka, Raha, and Bau-Bau. This research applied the survey research method. The population of this research was the microcredit customer of BRI in South East Sulawesi. 200 respondents were selected by applying accidental sampling technique. The analysis method was Structural Equation Model (SEM). The data processing was used Statistical Package for Social Science (SPSS) and Analysis of Moment of Structure (AMOS) computer package.

The results of this research indicated that 1) the microcredit has direct effect positively and significantly to the capacity of microenterprise, 2) the capacity of microenterprise has direct effect positively and significantly on poverty alleviation, 3) the microcredit has no significant effect on poverty alleviation in South East Sulawesi.

Keywords: Microcredit, poverty alleviation, and microenterprise.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	17
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teori tentang kredit	21
B. Layanan keuangan mikro	45
C. Kaitan layanan keuangan mikro dan kemiskinan	55
D. Kaitan lembaga keuangan mikro dan pengentasan kemiskinan	70
E. Layanan keuangan mikro dan jenis usaha	72
F. Teori utama dan paradigma kemiskinan	82
G. Kemiskinan di Indonesia	90
H. Beberapa penelitian sebelumnya	107
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kerangka konseptual	112
B. Hipotesis penelitian	122
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Desain penelitian	124
B. Lokasi dan waktu penelitian	125
C. Populasi dan sampel penelitian	125
D. Jenis dan sumber data	128
E. Metode pengumpulan data	129
F. Instrumen penelitian	130
G. Teknik analisis data	130
H. Definisi operasional variabel penelitian	140
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum penyaluran kredit di Sulawesi Tenggara	144
B. Karakteristik responden	152

C. Gambaran kredit mikro, usaha mikro, dan kemiskinan Di Sulawesi Tenggara	157
D. Deskripsi Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit	162
E. Deskripsi variabel penelitian dan indikatornya	166
F. Pengujian model pengukuran	177
G. Pengujian terhadap asumsi SEM lainnya	186
H. Pengujian model lengkap	186
I. Pengujian model struktural (signifikansi antar variabel)	190
J. Pembahasan hasil penelitian	197
K. Implikasi hasil penelitian	211
L. Keterbatasan penelitian	213
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	216
B. Saran-Saran	217
DAFTAR PUSTAKA	220
LAMPIRAN	229

DAFTAR TABEL

Nomor		halaman
1.	Lembaga Keuangan Mikro, Juni 2004	9
2.	Sumber Modal Usaha Mikro	12
3.	Jenis kesulitan Usaha Mikro	13
4.	Perkembangan Usaha Mikro di Sulawesi Tenggara (2005-2006)	14
5.	Nilai Kredit Program dan Kredit Umum Pedesaan di Sulawesi Tenggara (2000-2004)	14
6.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara (2002-2004)	16
7.	Target Pembiayaan Keuangan Mikro	51
8.	Unit Penilaian Dampak Microfinance, Kelebihan dan Kekurangan	61
9.	Teori Neo-Liberal dan Sosial Demokrat	83
10.	Jumlah Sampel dan Teknik Estimasi	127
11.	Ukuran Penilaian Kesesuaian Model Dengan Data	136
12.	Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	138
13.	Indikator Pengukur Variabel Usaha Mikro	142
14.	Indikator Pengukur Variabel Pengentasan Kemiskinan	143
15.	Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaannya di Sulawesi Tenggara (Juta Rp)	144
16.	Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha di Sulawesi Tenggara (Juta Rp)	146

17.	Posisi Kredit Usaha Kecil Bank Umum Menurut Kelompok Bank di Sulawesi Tenggara	147
18.	Jumlah Peminjam Kredit Mikro di BRI Sulawesi Tenggara tahun 2001-2005	149
19.	Nilai Pinjaman Kredit Mikro di BRI Sulawesi Tenggara Tahun 2001-2005	150
20.	Nilai Pinjaman Kredit Mikro Berdasarkan Sektor Usaha Pada Bank BRI Sulawesi Tenggara	151
21.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	152
22.	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	153
23.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	154
24.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	155
25.	Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal	157
26.	Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	160
27.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara	161
28.	Deskripsi Responden Sebelum dan Sesudah Ada Kredit	165
29.	Ukuran Indeks Kesesuaian Model Dengan Data	178
30.	Hasil Pengujian Indikator Usaha Mikro Tahap Awal	179
31.	Hasil Pengujian Indikator Usaha Mikro Tahap Akhir	180
32.	Uji Kesesuaian Model Variabel Usaha Mikro Tahap Akhir	181
33.	Hasil Pengujian Indikator Pengentasan Kemiskinan	182

34.	Indikator Pengentasan Kemiskinan yang Valid	183
35.	Uji Kesesuaian Model Variabel Pengentasan Kemiskinan Tahap Akhir	184
36.	Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Tingkat Alpha	184
37.	Perhitungan Reliabilitas Konstruk	185
38.	Tingkat Signifikansi Pengaruh Koefisien Jalur Tahap Awal	187
39.	Tingkat Signifikansi Pengaruh Koefisien Jalur Tahap Akhir	190
40.	Uji Kesesuaian Model Lengkap Tahap Akhir	190
41.	Pengaruh Langsung Hubungan Antar Variabel	192
42.	Pengaruh Tidak langsung Hubungan Antar Variabel	194
43.	Pengaruh Total Hubungan Antar Variabel	195

DAFTAR GAMBAR

Nomor		halaman
1.	Aliran Kredit Dari Surplus Units Kepada Deficit Units	45
2.	Layanan Mikro Kepada Penduduk Miskin	46
3.	Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Formal dan Non Formal Dalam Memberikan Layanan Keuangan	48
4.	Dampak Keuangan Mikro Pada Masyarakat	58
5.	Model Jalur Dampak Keuangan Mikro	60
6.	Kerangka Konseptual Dampak Keuangan Mikro	65
7.	Dampak Microfinance Pada Level Mikro, Meso dan Makro	67
8.	Dampak Microfinance Pada Aktivitas Non-Ekonomi	68
9.	Tahap Jenis Usaha Mikro	77
10.	Pola Pembiayaan dan Kemampuan Usaha Pada BRI	80
11.	Lingkaran Kemiskinan	96
12.	Kerangka Pikir Penelitian	117
13.	Model Penelitian	118
14.	Kerangka Konseptual Penelitian	119
15.	Model Struktural Hubungan Antar Variabel	132
16.	Pengujian Model Lengkap Tahap Awal	187
17.	Pengujian Model Lengkap Tahap Akhir	189

DAFTAR Lampiran

Nomor		halaman
1.	Data Hasil Penelitian Kredit Mikro di Sulawesi Tenggara	229
2.	Karakteristik Responden	243
3	Tabel Frekwensi Kredit	246
4	Tabel frekwensi modal	247
5	Tabel Frekwensi Tenaga Kerja	248
6	Tabel Frekwensi Penjualan	249
7	Tabel Frekwensi Keuntungan	251
8	Tabel Frekwensi Teknologi	253
9	Tabel Frekwensi Asset Usaha	255
10	Tabel Frekwensi Pendapatan	257
11	Tabel Frekwensi Konsumsi	258
12	Tabel Frekwensi Asset Rumah Tangga	259
13	Tabel Frekwensi Pendidikan	260
14	Tabel Frekwensi Kesehatan	261
15	Analisis Konfirmatori Usaha Mikro Tahap Awal	262
16	Maximum Likelihood Estimates Usaha Mikro Tahap Awal	263
17	Intercepts Kapasitas Usaha Mikro	264
18	Modifikasi Indeks Usaha Mikro	265

19	Model Fit Summary Usaha Mikro Tahap Awal	266
20	Analisis konfirmatori Usaha Mikro Tahap Akhir	267
21	Maximum Likelihood Estimates Usaha Mikro Tahap Akhir	268
22	Intercepts Kapasitas Usaha Mikro Tahap Akhir	269
23	Model Fit Summary Usaha Mikro Tahap Akhir	270
24	Analysis Konfirmatori Pengentasan Kemiskinan Tahap Awal	271
25	Maximum Likelihood Estimates Pengentasan Kemiskinan Tahap Awal	272
26	Intercepts Pengentasan Kemiskinan Tahap Akhir	273
27	Modifikasi Indeks Pengentasan Kemiskinan	274
28	Model Fit Summary Pengentasan Kemiskinan Tahap Awal	275
29	Analisis Konfirmatori Pengentasan Kemiskinan Tahap Akhir	276
30	Maximum Likelihood Estimates Pengentasan Kemiskinan Tahap Akhir	277
31	Intercepts Pengentasan Kemiskinan Tahap Akhir	278
32	Model Fit Summary Pengentasan Kemiskinan Tahap Akhir	279
33	Uji Nilai Ekstrim Dengan Nilai Zscore	280
34	Model Lengkap Tahap Awal	281
35	Maximum Likelihood Estimates Overal Model Tahap Awal	282
36	Intercepts Model Lengkap Tahap Awal	284

37	Indeks Modifikasi Overall Model	285
38	Model Fit Summary Overall Model Tahap Awal	287
39	Output Model Lengkap Tahap Akhir	288
40	Maximum Likelihood Estimates Overall Model Tahap Akhir	289
41	Standardized Regression Weights	290
42	Intercepts Model Lengkap Tahap Akhir	291
43	Model Fit Summary Overall Model Tahap Akhir	292
44	Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Total Pengaruh	293

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan mikro (*microfinance*) merupakan alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan oleh pemerintah Indonesia dalam tiga hal sekaligus, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi para pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan usahanya dan keluarga miskin dalam mengurangi kerentanan hidup (Anonim, 2005).

Keuangan mikro sebagai salah satu alat dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*), terutama terkait dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, pencapaian tingkat pendidikan dasar, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kesehatan masyarakat telah mendapat pengakuan internasional dari badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), hal ini dengan dicanangkannya tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Internasional (Al Jufri, 2004).

Beberapa hal yang mendasari mengapa keuangan mikro penting terutama dalam memberikan layanan keuangan mikro kepada usaha mikro yaitu karena jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia cukup besar, dari total

unit usaha yang ada di Indonesia sebesar 98,5% adalah usaha mikro atau sebesar 41,8 juta unit adalah usaha mikro pada tahun 2004 (Ismawan dan Budiantoro, 2005). Selanjutnya, usaha mikro memiliki keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum, dan manajemen sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutuskan pemberian kreditnya (Sumodiningrat, 2003).

Keuangan mikro (kredit mikro) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pinjaman kredit dapat mendorong para petani atau pengusaha untuk melakukan investasi baru atau mengadopsi teknologi baru. Dalam kaitan itu, kredit ini sering dihubungkan dengan upaya pengentasan kemiskinan sebab kredit mikro diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan memiliki usaha kecil.

Kredit mikro dianggap penting, baik dari sudut pandang pemerintah maupun dari sisi pengusaha yang membutuhkan kredit. Dari sisi pemerintah kredit mikro dapat dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro. Pinjaman kredit akan memberikan dampak pada usaha misalnya, kenaikan pembelian input atau penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan output. Meningkatnya output, penjualan akan meningkat selanjutnya keuntungan meningkat. Bahkan dimungkinkan penyerapan tenaga kerja karena adanya tambahan modal kerja atau

investasi baru. Dampak yang lebih luas adalah meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian kredit mikro sangat penting bagi pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Dari sisi pengguna kredit mikro dianggap sangat penting, sebab umumnya pengusaha mengalami hambatan permodalan untuk melakukan investasi baru atau dalam melakukan perubahan teknologi. Tanpa kredit mikro para pengusaha akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, sebab umumnya para pengusaha mikro tidak memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan pengembangan usaha.

Kredit mikro tidak hanya penting dalam pengertian untuk pengembangan usaha mikro, akan tetapi lebih penting bahwa kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan keuangan dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Untuk itulah kredit ini dirancang sedemikian rupa agar dapat memudahkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dapat memiliki akses meminjam kredit di lembaga keuangan formal, seperti persyaratan peminjaman kredit yang lunak. Dengan demikian kredit mikro akan memberikan pengaruh yang positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Oleh karena kredit mikro pada dasarnya diperuntukkan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh kelompok masyarakat miskin, dengan demikian jelas bahwa kredit ini memberikan peran yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Robinson (2001) mengemukakan bahwa pengentasan

kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan juga melalui layanan keuangan mikro. Pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun perlu diperhatikan bahwa cara ini merupakan salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan, jika pinjaman kredit tersebut hanya diberikan kepada penduduk yang memiliki usaha mikro.

Selanjutnya Robinson (2001) mengemukakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang sangat miskin lebih tepat disiapkan oleh pemerintah, seperti program pangan dan penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi. Sedangkan masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, kepada mereka lebih tepat dengan pendekatan pemberian layanan keuangan mikro.

Dapat dikemukakan bahwa keuangan mikro sebagai salah satu cara yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan, tidak ditujukan untuk memberikan layanan keuangan atau bantuan kepada penduduk miskin yang tidak mempunyai usaha. Akan tetapi, keuangan mikro lebih menfokuskan pengentasan kemiskinan bagi penduduk miskin yang memiliki usaha. Ini dimaksudkan agar dengan bantuan tersebut penduduk miskin diharapkan dapat mengembangkan bantuan yang diberikan, untuk menambah pendapatannya, meningkatkan usaha,

melakukan perubahan penggunaan teknologi baru, bahkan bila usaha berkembang dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha.

Dalam hubungan layanan keuangan mikro terhadap usaha mikro, Vogelgesang (2001), mengemukakan bahwa dengan adanya pinjaman kredit dapat memberikan diversifikasi sumber keuangan bagi usaha mikro, sehingga dapat meningkatkan hasil usaha, meningkatkan asset perusahaan terutama untuk barang tahan lama, dan yang terpenting bagi perusahaan dapat meningkatkan keuntungan usaha.

Madajewicz (2003), mengemukakan bahwa keuangan mikro memberikan pengaruh yang cukup luas dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, bahkan keberadaan keuangan mikro tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan individu dan rumah tangga sehingga kesejahteraan meningkat, akan tetapi hal ini juga memberikan kontribusi positif pada ekonomi masyarakat desa.

Dibeberapa negara berkembang seperti Banglades, Pakistan, Pilifine, Uganda dan Bolivia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pemberian pinjaman kredit mikro. Di Banglades salah satu strategi yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberikan layanan keuangan mikro bagi penduduk miskin yang dimotori oleh *Grameen Bank*. Khandker (2003), mengemukakan bahwa keuangan mikro di Banglades telah berhasil meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat,

konsumsi meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Demikian halnya dengan Pit (2003) mengemukakan bahwa kredit mikro memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan wanita dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Todd (2000), mengemukakan bahwa di Filipina kredit yang diberikan kepada penduduk miskin oleh lembaga keuangan *Ahon sa Hiras (ASHI)* dari 76% peminjam dikategorikan sangat miskin, setelah meminjam kredit, persentase kategori tersebut menurun menjadi 13%. Hal ini menunjukkan bahwa kredit mikro memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan.

Sutoro dan Haryanto (1996) dalam Robinson (2002), mengemukakan hasil survey tahun 1996 bahwa 99% responden yang meminjam KUPEDES BRI mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Meningkatnya usaha mereka menyebabkan mereka dapat menggunakan pendapatannya untuk berbagai tujuan seperti pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, asset rumah tangga, melengkapi kebutuhan rumah tangga seperti listrik dan pembukaan rekening tabungan.

Keuangan mikro sebagai layanan keuangan kepada penduduk miskin atau yang berpendapatan rendah telah menjadi isu utama di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui keuangan mikro sudah menjadi suatu komitmen pemerintah dan

lembaga-lembaga keuangan didalam negeri, yang didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan, seperti adanya berbagai jenis bantuan kredit untuk penduduk miskin, untuk para nelayan didaerah pesisir dan para petani dan juga penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan.

Keuangan mikro di Indonesia sudah berkembang cukup lama terutama keuangan mikro yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, disamping keuangan mikro yang dikembangkan oleh lembaga keuangan mikro lainnya. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bank milik pemerintah telah memberikan layanan keuangan mikro kepada masyarakat berpendapatan rendah lebih dari 100 tahun. Pada tahun 1970 hingga tahun 1983, Bank Rakyat Indonesia telah menjadi *channeling* bagi penyaluran dana pemerintah dalam rangka mendukung program pangan melalui kredit bersubsidi dengan mendirikan 3.600 BRI unit desa yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pengalaman menunjukkan bahwa kredit program BIMAS dan jenis kredit lainnya yang disalurkan melalui BRI mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya intervensi birokrat dalam menentukan penerima kredit. Pada tahun 1983 kredit bersubsidi berakhir dan BRI masuk pada babak baru dengan kebebasanya dalam menentukan penerima kredit dengan melahirkan produk *Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)*. Kredit ini adalah

kredit ditujukan untuk semua kegiatan produktif, pemberiannya kepada individu dengan jumlah pinjaman maksimal Rp 50 juta.

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), visi utama yang hendak dicapai adalah sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan visi utama API, maka sangat tepat dengan fokus BRI saat ini dalam menggarap bisnis mikro, ritel dan menengah.

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank yang konsisten dalam memberikan layanan keuangan terhadap golongan ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut terlihat dari fokus BRI dalam memberikan perhatian terhadap bisnis mikro, ritel, dan menengah. Segmen bisnis mikro, ritel, dan menengah akan terus menjadi fokus bisnis bank BRI dengan total portofolio kredit yang diberikan pada tiga segmen tersebut tidak kurang dari 80% dari total kredit yang disalurkan (Sugema, dkk, 2005).

Bank Rakyat Indonesia sebagai bank komersial yang menfokuskan pada *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, terlihat pada portofolio kreditnya 86,7% untuk UMKM dari total portofolio kuartal ketiga tahun 2004 dan sisanya adalah untuk kredit korporat sebesar 13,3%, dimana ditunjukkan bahwa kebijakan manajemen BRI selalu menjaga segmen kredit mikro minimum 30% dari total portofolio (Financial Result BRI, 3Q-2004).

Meskipun penyaluran kredit mikro pada bisnis mikro hanya sebesar 30% dari total kredit yang disalurkan pada tahun 2004, akan tetapi pada segmen ini memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan laba BRI (sekitar 40%), dan juga bisnis mikro tersebut merupakan penyangga dalam keadaan krisis. Hal ini karena didukung oleh luasnya jaringan, tata kerja yang sederhana dan ramping dan SDM yang terlatih serta ditopang oleh 4.050 kantor BRI Unit yang tersebar diseluruh indonesia (Sugema, dkk, 2005).

Tabel 1. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Juni 2004

Institutions	Outlets	Outstanding Loans (000)	Loan Amount (000.000)	Saving Accounts	Saving (000.000)
BPR	2,156	2,400	10,418,000	5,610,000	9,254,000
BRI Unit	4,049	3,100	14,182,000	29,870,000	27,429,000
BKD	5,345	400	197	480,000	380
KSP	1,097	665	531,000	na	85,000
USP	35,218	10,141	3,629,000	na	1,157,000
LDKP	2,272	1,300	358,000	na	334,000
Pawnshop	772	15,692	21,000	Not Saving	Not Saving
BMT	3,038	1,200	157,000	na	209,000
BK3D	1,022	235	396,000	207,147	272,000
LSM	124	162	110,000	81,931	12,000
Total	55,093	35,295	28,814,926	36,249,078	38,752,472

Sumber: Jansen, et. al., 2005

Keterangan:

na = not available

Tabel 1, Menunjukkan bahwa keuangan mikro BRI Unit memiliki jumlah pinjaman dan tabungan yang terbesar dibandingkan dengan keuangan mikro lainnya sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah pinjaman

sebesar Rp. 14,182 triliun kepada 3,1 juta orang per juni 2004. Jumlah penabung sebanyak 29.870.000 orang dengan total tabungan sebesar Rp. 27,429 triliun. Walaupun outlet USP memiliki sebanyak 35.218 lebih banyak dari outlet BRI unit, tapi jumlah yang dipinjamkan hanya Rp.3,629 triliun, dengan jumlah tabungan sebesar Rp. 1,157 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah tabungan yang dipinjamkan oleh BRI unit.

Sebagai bank komersil BRI yang memiliki jaringan luas dan SDM yang terlatih serta berpengalaman dalam memberikan pelayanan keuangan mikro, dimana secara alamiah berhubungan langsung dengan masyarakat miskin sehingga mendapat kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat di Indonesia. BRI mendapat pengakuan dari lembaga internasional sehingga menjadikan BRI sebagai salah satu contoh dalam pengembangan keuangan mikro di dunia.

Arianto (2004), mengemukakan keberhasilan BRI mendapat pengakuan internasional, karena BRI menerapkan strategi yang tepat dalam menjalankan keuangan mikro, yaitu (i) *Banks follow to businesses* dimana bisnis tidak didasarkan pada *supply-leading finance theory* akan tetapi berdasarkan *market driven*; (ii) *Credit is not a magic cure*, kredit akan memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, bilamana kredit diberikan kepada usaha mikro yang mengalami kendala permodalan dan membutuhkan kredit; (iii) *Using the right tools* bahwa keuangan mikro sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan

haruslah mengerti secara seksama kondisi penduduk miskin tersebut sehingga keuangan mikro diterapkan secara tepat yaitu kepada penduduk miskin yang memiliki usaha mikro.

Selanjutnya Arianto mengemukakan bahwa selain strategi yang tepat diterapkan dalam menjalankan keuangan mikro, kesuksesan BRI juga karena tetap fokus pada *sustainability, simplicity, transparency, prudential banking practices*, dan *accessibility*.

Komitmen BRI tetap fokus pada pembiayaan UMKM dengan menjaga persentase portofolio kreditnya minimal 80%. Beralasan bila hal ini ditinjau dari struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2000 dari 39,04 juta unit usaha yang ada, sebesar 38,99 juta (99,99%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah. Dan apabila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39,04 juta usaha. Dari total tenaga kerja yang terserap pada tahun 2000 sebesar 74.746.551 orang, UMKM menyerap sebesar 99,4% dari total tenaga kerja, jadi usaha besar hanya menyerap 0,6% dari total tenaga kerja (Tambunan, 2002).

Dari jumlah usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 39,04 juta usaha yang mampu menyerap 99,4% tenaga kerja di Indonesia akan menjadi masalah yang cukup pelik apabila kepada mereka tidak diberikan bantuan pengembangan usaha melalui penambahan modal kerja atau investasi baru.

Mereka akan berada pada kondisi ketidak berdayaan (*the extreme poor*). Oleh karena itu, salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut yaitu dengan adanya pembiayaan masyarakat miskin atau pengusaha mikro melalui layanan keuangan mikro.

Tabel 2 menunjukkan sumber pembiayaan usaha mikro. Kenyataan menunjukkan bahwa modal usaha mikro (industri kecil rumah tangga/IKR) mengandalkan modal sendiri 90,36%. Sementara pinjaman untuk penambahan modal sebesar 70,35% dari sumber lain-lain. Terutama dari rentenir (*money lender*).

Besarnya persentase usaha mikro yang meminjam uang kepada pelepas uang karena kemudahan yang diberikan dalam proses transaksi meskipun pengusaha mikro harus mengembalikan pinjamannya dengan tingkat bunga yang tinggi. Hal tersebut dilakukan karena akses ke bank sangat terbatas terutama dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti jaminan.

Tabel 2. Sumber Modal Usaha Mikro

Uraian	IKR
Modal Sendiri	90,36%
Modal Pinjaman	3,20%
Modal Sendiri dan Pinjaman	6,44%
Jumlah	100%
Asal Pinjaman:	
Bank	18,79%
Koperasi	7,09%
Institusi lain	8,25%
Lain-lain	70,35%

Sumber: Ismawan (2003).

IKR = Industri Kecil Rumah Tangga (usaha mikro)

Tabel 3, menunjukkan kendala yang dihadapi oleh usaha mikro. Bila dilihat data tersebut 34,55% kendala utama yang dihadapi adalah persoalan permodalan, akan tetapi juga mengalami hambatan pemasaran hasil produk dan pengadaan bahan baku untuk kegiatan produksi. Dari data tersebut jelas bahwa usaha mikro tidak hanya membutuhkan bantuan permodalan namun juga bantuan lain seperti pemasaran dan pengadaan bahan baku untuk produksi.

Tabel 3 Jenis kesulitan Usaha Mikro

Jenis Kesulitan	IKR
Kesulitan Modal	34,55%
Pengadaan Bahan Baku	20,14%
Pemasaran	31,70%
Lain-Lain	13,6%

Sumber: Ismawan, 2004.

Meskipun usaha mikro banyak kendala yang dihadapinya, namun keberadaan usaha mikro tidak dapat diabaikan, sebab keberadaan usaha mikro telah mampu memberikan bukti dalam membantu pemerintah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Di Sulawesi Tenggara jumlah usaha mikro pada tahun 2005 sebanyak 8.471 Unit, dan pada akhir tahun 2006 telah meningkat menjadi 14.792 Unit, atau meningkat sebesar 74,62%. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha mikro pada tahun 2005 sebanyak 21.460 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi sebesar 40.995 orang. Peningkatan tidak hanya terjadi pada jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tapi juga terjadi peningkatan asset sebesar 205,29% dari tahun 2005 hingga tahun 2006.

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2006 sebesar 40.995 orang merupakan salah satu kontribusi nyata usaha mikro dalam mengatasi masalah pengangguran di Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah usaha mikro sebesar 14.792 unit, maka untuk setiap usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja rata-rata diatas 2 orang. lihat Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Usaha Mikro di Sulawesi Tenggara (2005-2006)

Tahun	Usaha Mikro (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Asset (milyar)
2005	8.471	21.460	313,96
2006	14.792	40.995	958,51

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan PMD Sultra, 2007

Kredit mikro pada BRI atau sering disebut Kredit Umum Pedesaan merupakan salah satu layanan keuangan mikro di Sulawesi Tenggara yang disalurkan melalui BRI Unit. Nilai penyaluran KUPeDES seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) di Sulawesi Tenggara (2000-2005)

Tahun	Nilai KUPeDES (000)	Pertumbuhan (%)
2000	58.101.000	-
2001	70.984.000	22
2002	79.485.210	12
2003	118.929.731	50
2004	190.119.290	60
2005	228.127.091.	20

Sumber: BRI Wilayah Makasar, 2006

Pada tahun 2000 nilai KUPeDES hanya berjumlah Rp. 58.101.000.000, namun pada tahun 2005 telah meningkat menjadi Rp. 228.127.091.000. Bila dilihat dari pertumbuhan kredit mikro BRI sejak tahun 2000 terjadi pertumbuhan positif hingga tahun 2005, namun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 60%.

Kenaikan nilai pinjaman tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Semakin banyak pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro, maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan hal tersebut akan memberikan dampak bagi upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Namun yang menjadi masalah apakah kredit yang dipinjam oleh para pengusaha mikro tersebut digunakan untuk kebutuhan pengembangan usaha. Jika pinjaman ini digunakan untuk tujuan produktif maka akan memberikan dampak yang positif terhadap pengentasan kemiskinan, sebaliknya jika kredit tersebut tidak digunakan untuk tujuan tidak produktif maka pengaruhnya kurang terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

Meskipun ada penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara lihat Tabel 6, namun angka kemiskinan tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata nasional dibawah 20% sejak tahun 2000 hingga tahun 2005. Sedang di Sulawesi Tenggara dengan persentase rata-rata diatas 21% dari total penduduk sejak tahun 2002 hingga 2004.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara (2002-2004)

Tahun	Perkotaan		Pedesaan		Kota dan Desa	
	Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	(000)	%	(000)	%	(000)	%
2002	43,53	10,69	420,30	27,87	463,84	24,22
2003	39,4	9,86	389,0	26,36	428,4	22,84
2004	38,0	9,21	380,4	25,39	418,4	21,90

Sumber: BPS, 2005.

Kemiskinan di Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di pedesaan hal ini dapat dilihat pada tahun 2004 perbandingan penduduk miskin di pedesaan dengan di perkotaan sangat menyolok. Persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 25,39% dari total penduduk, sementara di perkotaan hanya sebesar 9,21%. Meskipun pemerintah telah menyalurkan berbagai jenis bantuan permodalan bagi masyarakat pedesaan, namun hal ini belum mampu untuk menjauhkan penduduk desa dari kemiskinan.

Bila dilihat uraian sebelumnya, di satu sisi terjadi peningkatan penyaluran kredit untuk usaha mikro, dipihak lain penduduk miskin di Sulawesi Tenggara terjadi penurunan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi baik diperkotaan maupun dipedesaan. Salah satu faktor yang berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut adalah dikucurkannya berbagai jenis pinjaman untuk modal usaha. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kredit mikro BRI yang disalurkan di Sulawesi

Tenggara selama ini memberikan pengaruh signifikan dan membantu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Robinson (2001), Hulme (1997), dan Tod (2000), bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha. Bantuan tersebut diharapkan secara langsung dapat memberikan pengaruh terhadap usaha mikro dan pada akhirnya memberikan dampak pada upaya pengentasan kemiskinan.

Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengentasan kemiskinan, salah satu cara adalah dengan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Terkait dengan layanan keuangan tersebut BRI dalam konteks API lebih fokus pada bisnis mikro, ritel dan menengah. Namun karena keterbatasan peneliti, maka dalam penelitian ini hanya akan fokus pada penelitian pengaruh jumlah kredit mikro BRI terhadap pengentasan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas usaha mikro.

B. Rumusan Masalah

BRI merupakan lembaga keuangan yang secara langsung turut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat, melalui layanan keuangan mikro yang diberikan kepada usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan khususnya di Sulawesi Tenggara.

Meskipun terdapat beberapa lembaga yang menyalurkan kredit mikro di Sulawesi Tenggara, namun penyaluran kredit tersebut sangat terbatas jangkauannya dalam memberikan layanan keuangan mikro. Berbeda dengan kredit mikro BRI yang dikembangkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya, sebab BRI memiliki fasilitas perkantoran yang mudah diakses oleh masyarakat dan juga didukung oleh SDM yang terlatih dalam memberikan layanan keuangan.

Pengaruh kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan yang disalurkan kepada usaha mikro diperlukan suatu pengujian secara empirik, sebab pada kenyataannya kredit yang diterima oleh debitur banyak kendala dilapangan dalam penggunaannya seperti pengaruh kondisi alam yang sering mengalami perubahan pada sektor pertanian, usaha perikanan dan sebagainya. Hal lain yang memungkinkan penggunaan kredit tersebut kurang memberikan pengaruh terhadap upaya pengembangan kapasitas usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga adalah pemanfaatan pinjaman terhadap kegiatan yang kurang produktif.

Untuk melihat pengaruh pinjaman yang diterima, maka dapat diidentifikasi pada beberapa variabel pada kapasitas usaha mikro seperti modal usaha mikro, penciptaan kesempatan kerja, meningkatnya asset usaha, volume penjualan, meningkatnya keuntungan usaha dan perubahan teknologi yang digunakan. Dengan melihat perubahan variabel –variabel

tersebut, maka dapat dilihat pengaruh kredit secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan.

Adapun masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah kredit mikro mempunyai pengaruh signifikan terhadap kapasitas usaha mikro di Sulawesi Tenggara?
2. Apakah kapasitas usaha mikro mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara?
3. Apakah jumlah kredit mikro mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh layanan keuangan mikro (kredit mikro) terhadap pengentasan kemiskinan, terutama dalam hubungannya dengan penyaluran kredit mikro melalui usaha mikro. Adapun tujuan khusus penelitian ini yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah jumlah kredit mikro mempunyai pengaruh signifikan terhadap kapasitas usaha mikro di Sulawesi Tenggara
- b. Untuk mengetahui apakah kapasitas usaha mikro mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

- c. Untuk mengetahui apakah jumlah kredit mikro mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi positif bagi pihak yang terkait dalam pembangunan ekonomi, khususnya peranan layanan keuangan mikro terhadap pengentasan kemiskinan.
- b. Untuk memberikan dukungan empirik bagi pengembangan keuangan mikro di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan kebijakan perkereditan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi empirik dan perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya terutama yang ada relevansinya dengan keuangan mikro dan pengentasan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Tentang Kredit

Para ahli ekonomi mengemukakan pada dasarnya bahwa dalam suatu negara dimana perekonomiannya didominasi oleh besarnya peranan “kredit” yang besumber dari sektor perbankan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara dengan sistem perekonomian utang (*overdraft/credit economy*). Sementara negara dimana bila perekonomiannya didominasi oleh peranan “uang” atau “asset keuangan” lain seperti surat-surat berharga yang diperjual belikan dalam pasar uang atau pasar modal, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara dengan sistem perekonomian pasar uang (*financial economy*) (Marsuki, 2005).

Jadi jelaslah bahwa basis ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan oleh peranan kredit atau uang didalam suatu negara. Dari perbedaan basis ekonomi nampak bahwa dalam kenyataan dimasyarakat peranan kredit dalam membangun ekonomi suatu negara sukar untuk dihindari karena kredit merupakan salah satu sumber keuangan yang potensial dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama ketika modal untuk berusaha mengalami kendala. Kendala modal terjadi pada usaha kecil maupun pada perusahaan besar sehingga keberadaan kredit untuk pengembangan usaha sangat dibutuhkan.

Teori utama (*grand theory*) yang menjelaskan tentang permintaan kredit dikemukakan oleh Keynes. Keynes sependapat dengan pandangan teori moneter klasik bahwa fungsi uang sebagai alat tukar, tetapi Keynes menambahkan fungsi lain dari uang adalah sebagai penyimpan nilai (*store of value*), dengan fungsi ini, sebagaimana dalam pasar komoditas harga komoditi ditentukan lewat mekanisme pasar, demikian halnya dengan keseimbangan pasar uang dimana harga uang adalah “tingkat bunga”. Jika tingkat bunga makin tinggi, maka uang semakin mahal, berarti uang semakin langka, begitulah sebaliknya. Dengan dasar ini dapat ditarik hubungan antara sektor moneter dengan sektor riil. Jika tingkat bunga semakin mahal jumlah investasi akan menurun, demikian sebaliknya. Dasar pemikiran ini kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat output.

Melalui “mekanisme transmisi”, dimana dengan adanya kebijakan moneter yaitu dengan menambah jumlah uang beredar akan dapat menurunkan tingkat bunga, menurunnya tingkat bunga permintaan kredit akan meningkat dengan demikian investasi baru akan tercipta (meningkat), meningkatnya investasi dapat menyebabkan output meningkat, yang pada akhirnya akan menstimulir pertumbuhan ekonomi, (Manurung dan Raharja, 2004).

1. Konsep dan Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata “ *Credere* “ berarti kepercayaan. Kepercayaan mengandung arti bahwa yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa kredit yang diberikan kepada penerima kredit (*debitur*) akan mengembalikan atau membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati, bagi penerima pinjaman ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh kreditur yang harus menepati atau melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.

Menurut *Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998* memberikan pengertian kredit, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga imbalan atau pembagian keuntungan”.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prather (1961) memberi pengertian, kredit memiliki banyak arti, tetapi dalam ekonomi kredit berkaitan dengan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai saat sekarang dan berjanji akan memngembalikan atau membayar dimasa yang akan datang. Sesuatu yang diterima mungkin dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat-surat berharga. Janji yang telah dibuat pembayarannnya bisa dalam bentuk uang, barang, jasa-jasa, atau surat-surat berharga.

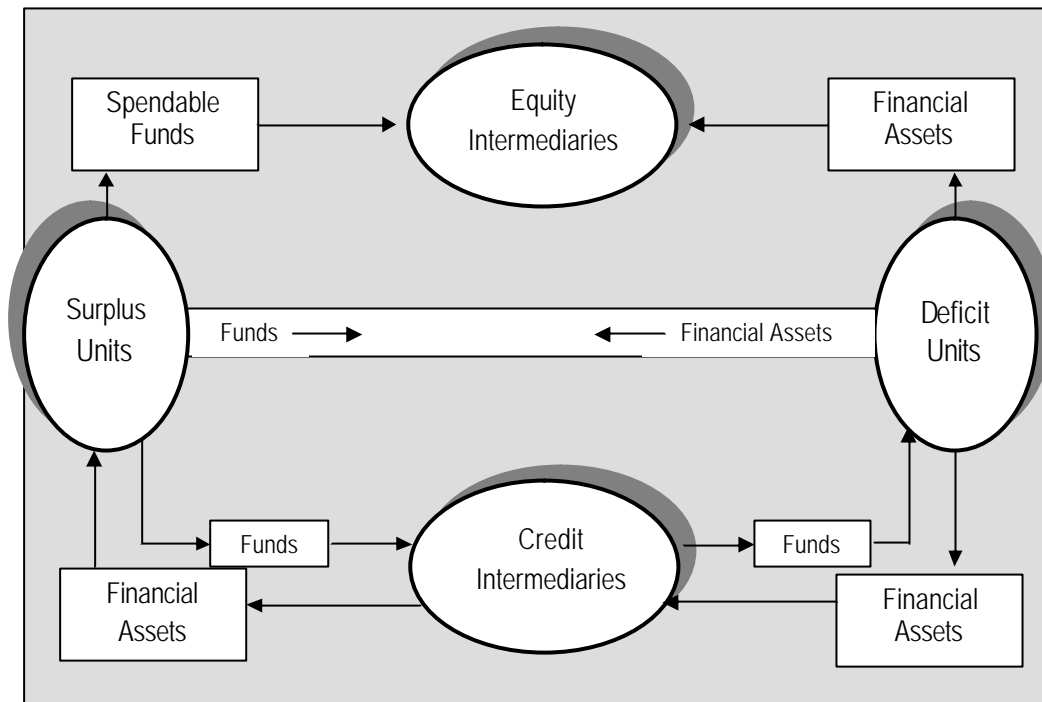
Menurut Kamsir (2001) kredit diartikan memperoleh barang dan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang

pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Kredit yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang pembayarannya adalah menggunakan metode angsuran atau cicilan. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil, maka pihak bank dan nasabah bank membuat kesepakatan diantara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*) mengenai jangka waktu pembayaran dan suku bunga ditetapkan bersama.

Bila dilihat dari suatu sistem aliran kredit sampai kepada yang memerlukan kredit, maka dapat dilihat peran perantara keuangan dalam memfasilitasi keuangan yang dibutuhkan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Perantara keuangan tidak hanya berfungsi menyalurkan kredit kepada yang memerlukan kredit tapi juga berfungsi menyimpan dana bagi yang kelebihan dana misalnya dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka. Perbankan memberikan akses kepada siapa saja yang memerlukan kredit untuk pembiayaan suatu usaha asal memenuhi kesepakatan yang dibuat diantara kedua belah pihak.

Bagaimana kredit mengalir dari unit kelebihan dana ke unit kekurangan dana, Cathcart (1982) menggambarkan hal ini pada Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1. Aliran Kredit Dari Surplus Units Kepada Deficit Units

Sumber: Cahcart, 1982

Pada Gambar 1 menunjukkan aliran dana dari yang memiliki kelebihan dana kepada yang mengalami kekurangan dana. Kelebihan dana yang dimiliki masyarakat dapat mengalir kepada yang mengalami kekurangan dana dalam hal ini para pengusaha yang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha atau untuk investasi baru melalui *equity intermediaries* atau *credit intermediaries*. Dari sudut pandang *deficit units* dapat memperoleh dana melalui perantara kredit atau melalui *equity intermediaries*.

Aliran kredit dari kelebihan dana (*surplus units*) kepada kekurangan dana (*deficit units*) melalui perantara kredit. Perantara kredit disini dimaksudkan adalah perbankan. Pihak bank menyalurkan dana kepada yang memerlukan dana. Jadi pihak

bank mendapatkan dana dari yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada yang memerlukan kredit karena kekurangan dana.

Kredit dapat diberikan terutama ketika suatu aktivitas ekonomi yang mengalami kesulitan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi baru yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha. Keberadaan kredit tidak hanya terbatas dalam membiayai kegiatan ekonomi di perkotaan, akan tetapi juga pembiayaan kegiatan ekonomi di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kredit sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dan yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi suatu negara.

2. Pertimbangan Penyaluran Kredit

Karena kredit yang dipinjamkan oleh suatu lembaga *formal* maupun *non formal* diperlukan perputaran pinjaman tersebut, sehingga pinjaman yang diberikan kepada peminjam dapat dikembalikan tepat waktu dan sesuai dengan angsuran dan cicilannya, maka penyaluran kredit tersebut diperlukan suatu ketelitian pihak yang memberikan kredit tersebut guna mengurangi resiko di kemudian hari. Karena itu sebelum kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kemampuan dan kemauan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya. Menurut Susilo et al (2000) hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Perizinan dan Legalitas, karakter, pengalaman dan manajemen, kemampuan teknis, pemasaran, sosial, keuangan, dan agunan.

Perizinan dan Legalitas, bank tidak ingin menanggung resiko yang besar apabila dana setelah digunakan oleh nasabah debitur, lalu dikemudian hari, sebelum

nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha bank tidak dapat dilanjutkan karena tidak sah secara yuridis. Terhentinya kegiatan nasabah akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank, sehingga kredit atau pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Bentuk-bentuk perijinan atau aspek legalitas yang harus dipenuhi debitur sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah.

Karakter, karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasi, karena penampilan dan profesi tidak selalu dengan konsisten mencerminkan karakter seseorang . Untuk menilai karakter seorang nasabah dan meramalkan perilakunya dimasa yang akan datang bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain adalah profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku dimasa lalu. Meski bank telah berusaha memilih hanya nasabah yang diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari nasabah berperilaku berbeda.

Pengalaman dan manajemen, pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman yang tidak sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dijalankan akan mengurangi kinerja usaha nasabah. Manajemen usaha nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga akan mengurangi kinerja nasabah. Sebagai contoh seorang bekas pegawai pertamina akan cocok bila berusaha sebagai pedagang minyak tanah

Kemampuan Teknis, kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis. Tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, dan tingkat penguasaan teknologi merupakan contoh faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya.

Pemasaran, bagi kegiatan nasabah yang memerlukan suatu pemasaran produk, kegiatannya harus didukung oleh perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Rencana pemasaran ini tidak bisa dilaksanakan hanya sepiantas lalu saja. Apabila pemasaran produknya tidak berhasil hal ini akan menyulitkan nasabah dalam membayar utang yang dipinjam dari bank.

Sosial, keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut bisa sesuatu yang disukai masyarakat, atau tidak disukai oleh masyarakat. Pihak bank harus hati-hati dalam melihat permasalahan ini, sebab bila usaha nasabah kurang disukai masyarakat hal ini akan berpengaruh terhadap keuntungan nasabah dan pada akhirnya akan mengganggu kewajiban nasabah terhadap bank.

Keuangan, sehat atau tidak sehatnya usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan usaha nasabah. Dari laporan keuangan ini bank bisa melihat tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dan diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank,

permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban financial kepada pihak ketiga, dan alokasi efisiensi dana dalam membiayai akativitasnya. Masalah yang dihadapi terutama usaha kecil adalah tidak lengkapnya laporan keuangan sehingga bagi pihak perbankan kesulitan dalam menilai kondisi keuangan nasabah. Hal itu terjadi karena sumber daya manusianya yang masih kurang dalam memberikan laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang diberikan tidak lengkap. Pihak bank harus melihat laporan keuangan dengan keadaan riil keuangan nasabah.

Agunan, sebenarnya agunan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan pemberian kredit kepada nasabah. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan oleh bank terhadap berbagai aspek tidak selamanya mencerminkan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, karena itu diperlukan agunan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak perbankan. Hal penting penyerahan agunan adalah aspek yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan. Agunan tersebut, agunan utama adalah barang yang dibiayai oleh dana bank. Apabila dana dari bank digunakan untuk pembelian truk, maka truk tersebut dapat digunakan sebagai agunan utama. Agunan tambahan adalah barang yang tidak dibiayai oleh bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah. Karena itu nasabah harus menyerahkan agunan tambahan diluar barang yang dibeli dengan dana dari pihak bank.

Cole (1987) mengemukakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pertimbangan pemberian kredit adalah *Six Cs*, pertimbangan ini ditmaksudkan agar

kredit yang diberikan kepada pemohon kredit dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati adapun pertimbangan tersebut adalah: Pertama; terkait dengan reputasi pemohon kredit (*character*), Kedua; kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan pignamannya (*capacity*), Ketiga; berhubungan dengan asset yang dimiliki peminjam (*capital*), Keempat; terkait dengan jaminan fisik dan non fisik (*collateral*), Kelima; kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi usaha peminjam (*conditions*), dan Keenam; pangsa pasar yang dimiliki produk usaha peminjam (*competition*).

3. Jenis Kredit

Kamsir (2002) mengemukakan jenis kredit berdasarkan segi kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha. *Dilihat dari segi kegunaan*, pada dasarnya kredit yang diberikan memiliki kegunaan untuk investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Kegunaan yang lain adalah untuk kredit Modal Kerja kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan untuk biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Dilihat dari segi tujuan kredit, tujuan kredit ini dapat berupa kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit Konsumtif, Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi, dan kredit untuk tujuan perdagangan, Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Dilihat dari segi jangka waktu, Jangka waktu kredit yang disalurkan yaitu Kredit jangka Pendek dengan jangka waktu dibawah satu tahu, jangka menengah berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama. Masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

Dilihat dari segi jaminan, pemberian kredit dapat dengan Jaminan, Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur. Dan kredit tanpam jaminan yaitu merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama ini. *Dilihat dari segi sektor usaha,* kredit yang disalurkan dapat diberikan kepada sektor usaha antara laian Kredit Pertanian, Kredit Peternakan, Kredit Industri, Kredit Pertambangan, Kredit Profesi, Kredit Perumahan dan Kredit Pendidikan

Smith (1959) mengemukakan klasifikasi kredit berdasarkan, pertama kredit sebagai uang; kedua kredit sebagai *non-monetary*. Klasifikasi tersebut yaitu:

a. *Mercantile Kredit*

b. *Financial Kredit*

1) *Comercial*

2) *Speculative*

3) *Investment*

4) *Consumer*

Perbedaan antara *mercantile* dan *financial credit* didasarkan pada apa yang diperoleh peminjam. Jika yang didapat adalah barang dan berjanji membayar dimasa yang akan datang, maka kredit ini adalah *mercantile credit*. Bila peminjam mendapatkan uang dan berjanji akan membayar kembali dimasa yang akan datang, maka kredit ini adalah *financial credit*. *Commercial credit* jika kredit yang didapatkan digunakan untuk tujuan modal kerja. *Speculative credit* bila dana yang didapat digunakan untuk pembelian surat-surat berharga atau komoditi kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. *Investment credit* bila digunakan untuk pembelian modal tetap atau mesin untuk menambah kapasitas produksi. *Consumer credit* digunakan untuk tujuan konsumsi, seperti untuk pembelian mobil atau untuk membiayai kebutuhan kesehatan.

Klasifikasi kredit juga dikemukakan oleh Klise (1959) berdasarkan pada *Production vs. consumption; short, intermediate, dan long term; private vs. public*. Bank komersil pada awalnya hanya menyiapkan kredit untuk produksi, kemudian memasuki abad kedua puluh kredit perbankan juga diperuntukkan bagi kredit konsumsi. Kredit untuk jangka pendek hanya diperuntukkan untuk jangka waktu satu tahun, jangka menengah satu tahun hingga tiga tahun, dan untuk jangka panjang diatas lima tahun. Kredit juga dapat diperluas untuk kepentingan private sector dalam ekonomi, kredit untuk individu dan untuk usaha bisnis. Dalam hubungannya dengan

kredit *public sector*, biasanya pemerintah meminjam kredit untuk membangun fasilitas pendidikan atau untuk membangun fasilitas transportasi. Ketika terjadi perang pemerintah meminjam kredit guna membiayai kebutuhan peperangan termasuk dalam kredit sektor publik.

4. Kredit dan Stabilitas Perkonomian

Stabilitas perkonomian suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi yang ada seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, keseimbangan internal dan eksternal, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Untuk mempertahankan tingkat kestabilan perekonomian yang mantap maka berbagai kebijakan atau strategi dapat ditempuh. Kebijakan yang umum dapat dilakukan adalah dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter atau campuran kedua kebijakan (*mix policy*) tersebut. Kebijakan ini diterapkan tergantung pada kondisi ekonomi yang dihadapi. Misalnya ketika terjadi tingkat inflasi yang tinggi maka dapat ditempuh dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang populer dikenal dalam mengatasi tingkat inflasi yang tinggi yaitu kebijakan uang ketat (*tight money policy*) Yaitu kebijaksanaan dimana bank sentral mengurangi jumlah uang beredar dengan pengetatan pemberian kredit kepada masyarakat tentunya dalam hal ini bank sentral menggunakan kredit sebagai instrumen dalam kebijakan moneter.

Kredit sebagai instrumen kebijakan moneter dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga, stabilitas ekonomi dengan tingkat produksi dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Bila terjadi ketidakstabilan harga misalnya tingkat harga mengalami kenaikan (*inflasi*) atau terjadi penurunan harga

(*deflasi*), terjadi tingkat kesempatan kerja yang rendah atau terjadi tingkat produksi yang rendah, maka dengan menggunakan kebijakan kredit sebagai instrumen kebijakan moneter dapat diterapkan dalam mengatasi kondisi ini (Smith, 1959).

Kebijakan moneter dapat diterapkan dengan pendekatan pengendalian kuantitatif dan pengendalian kualitatif dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi (Wijaya, 1991). Pendekatan pengendalian Kuantitatif dapat dilakukan dengan merubah ketentuan nisbah cadangan wajib bank komersial, perubahan tingkat suku bunga diskonto, dan operasi pasar terbuka.

Bank sentral menentukan nisbah cadangan wajib minimum guna mempengaruhi kemampuan penciptaan uang giral oleh sistem perbankan melalui dua cara yaitu, pertama ia mempengaruhi besarnya cadangan kelebihan yang dimiliki, dan kedua ia mengubah angka pengganda uang giral yang tercipta dengan memberikan pinjaman. Jadi bank sentral dapat mempengaruhi kemampuan bank-bank umum untuk memberikan pinjaman dengan memanipulasi atau mengubah sesuai dengan tujuannya ketentuan nisbah cadangan wajib minimum yang harus dipegang oleh bank-bank umum.

Kenaikan persentase cadangan wajib akan mengurangi kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral, dalam hal ini akan mengurangi penawaran uang. Sebaliknya bila cadangan wajib minimum menurun, maka kemampuan bank umum untuk memberikan kredit semakin besar karenanya akan mendorong penawaran uang.

Bank sentral yang bertindak sebagai banknya bank umum dapat memberikan kredit kepada bank-bank umum. Bila sebuah bank meminjam uang dari bank sentral

maka ia menyerahkan surat utang dan ini dicatat sebagai pos pinjaman atau tagihan pada bank-bank umum (penciptaan uang giral). Pinjaman dari bank sentral oleh bank-bank umum menaikkan cadangan kelebihan, sehingga kemampuan untuk memberikan kredit kepada masyarakat dan karena itu menciptakan uang giral yang lebih besar.

Bank sentral mempunyai kekuasaan untuk mengubah tingkat suku bunga rediskonto yang dikenakan atas pinjaman bank-bank umum. Penurunan tingkat suku bunga rediskonto mendorong bank-bank komersil memperbesar cadangan dengan meminjam dari bank sentral. Tetapi bila suku bunga rediskonto tinggi, maka bank-bank komersil akan menaikkan suku bunga pinjamannya yang diberikan kepada masyarakat agar transaksi pinjaman menguntungkan.

Penawaran uang dapat dipengaruhi oleh bank sentral dengan mengubah tingkat suku bunga rediskonto. Kenaikan tingkat suku bunga rediskonto akan mengurangi penawaran uang, karena bank komersil akan menaikkan suku bunga pinjamannya, keadaan ini masyarakat enggan meminjam uang karena biaya pengembalian cukup tinggi. Sebaliknya bila tingkat suku bunga rediskonto menurun, akan meningkatkan minat masyarakat meminjam uang di bank umum dengan tingkat suku bunga rendah yang diberlakukan oleh bank umum, maka penawaran uang akan meningkat.

Piranti kebijakan moneter dengan operasi pasar terbuka (*open market operation*) hanya dapat dilakukan pada negara yang telah memiliki sektor keuangan atau pasar uang yang telah mapan, dimana terdapat cukup banyak surat-surat berharga atau surat utang negara agar operasi pasar terbuka dapat secara efektif dilaksanakan. Pembelian

dan penjualan obligasi negara oleh bank sentral dalam operasi pasar terbuka yaitu dari atau ke bank-bank umum dan masyarakat juga mempengaruhi cadangan kelebihan bank-bank umum. Dengan membeli obligasi atau surat utang negara di pasar uang baik dari masyarakat maupun bank-bank umum efeknya akan menaikkan cadangan milik bank umum. Hal ini akan menaikkan kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat.

Dari uraian pengendalian moneter kuantitatif dapatlah dijelaskan bila terjadi deflasi, kelesuan ekonomi, dan pengangguran. Otorita moneter memutuskan untuk menambah jumlah uang beredar yang diperlukan. Ini disebut sebagai kebijakan uang longgar. Sebaliknya bila terjadi kelebihan pengeluaran agregatif yang mendorong ekonomi kearah timbulnya inflasi, maka harus diambil kebijakan dan tindakan untuk mengurangi atau mengerem pengeluaran untuk membatasi atau mengurangi penawaran uang. Ini merupakan kebijakan uang ketat.

Piranti pengendalian moneter kuantitatif yang ditujukan untuk mengendalikan kuantitas kredit bank secara umum, dilengkapi dengan piranti pengendalian kualitatif. Ini meliputi pengendalian kredit selektif dan bujukan moral. Pengendalian kredit selektif adalah penentuan pagu kredit untuk penggunaan pada sektor tertentu dan penentuan suku bunga kredit untuk berbagai pennggunaan. Hal ini dilakukan ketika misalnya permintaan kredit untuk pengeluaran konsumsi perumahan atau barang tahan lama terlalu besar sehingga menimbulkan tekanan gejala terjadinya inflasi. Pengendalian dilakukan dengan menaikkan ketentuan minimum pembayaran uang muka dan memperpendek periode maksimum pembayaran cicilan. Ini berarti

menaikkan besarnya pembayaran cicilan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan pengeluaran konsumsi.

Persuasi moral merupakan himbauan dari otorita moneter terhadap kemungkinan buruk akibat perluasan ataupun kontraksi pemberian kredit baik terhadap bekerjanya sistem perbankan maupun terhadap perekonomian. Persuasi kepada bankir tidak hanya tertuju pada kredit perbankan secara keseluruhan tetapi himbauan ini juga dapat tertuju pada suatu jenis kredit tertentu atau kredit pada suatu sektor tertentu. Jadi bentuk persuasi moral ini lebih mengutamakan kerjasama pihak bankir dalam merespon kondisi ekonomi yang sedang terjadi.

5. Teori Permintaan dan Penawaran Kredit

Permintaan kredit dilakukan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Permintaan kredit karena kepentingan tertentu yang dibutuhkan oleh yang memerlukannya, misalnya untuk individu umumnya meminjam kredit untuk konsumsi pembelian rumah, pembelian mobil, dan berbagai keperluan rumah tangga. Perusahaan meminjam kredit untuk investasi perusahaan atau untuk modal kerja, sedangkan pemerintah meminjam uang untuk membiayai defisit anggaran atau untuk membiayai fasilitas umum.

Penawaran kredit atau pinjaman disediakan oleh lembaga formal maupun lembaga *non formal*. Lembaga formal seperti perbankan, sedangkan *non formal* berasal dari individu atau pelepas uang atau NGO. Penawaran uang yang berasal dari perbankan umumnya bervariasi jumlahnya dari kredit yang kecil hingga kredit yang cukup besar nilainya sehingga kredit yang diberikan dapat mempengaruhi kondisi

ekonomi suatu negara. Sedangkan pinjaman yang diberikan melalui lembaga *non formal* seperti individu umumnya tidak besar karena keterbatasan kemampuan keuangan yang dimiliki.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit. Permintaan kredit dipengaruhi oleh tingkat harga, tingkat pendapatan, tingkat bunga, ekspektasi inflasi, kebijakan fiskal, dan *the cost of equity finance*. Sedangkan penawaran uang dipengaruhi oleh pendapatan real, tingkat bunga, *the return on equity*, ekspektasi inflasi, dan kebijakan moneter (Cathcart, 1982).

a. Permintaan Kredit

Total permintaan kredit merupakan keseluruhan permintaan yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Variabel yang mempengaruhi permintaan tersebut pertama, *tingkat harga* berpengaruh positif terhadap permintaan kredit. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan tingkat harga dibutuhkan dana yang lebih besar untuk membeli keperluan seperti input, peralatan, mobil dan lain-lain sehingga permintaan kredit akan meningkat.

Variabel kedua yang berpengaruh pada permintaan kredit adalah *real income*. Hubungan antara pendapatan riil dengan permintaan kredit adalah hubungan positif. Ketika pendapatan riil tinggi, individu atau rumah tangga cenderung untuk meminjam uang sepanjang iklim ekonomi cukup baik. Pendapatan riil yang tinggi memberikan peluang bagi mereka yang berpendapatan tinggi dapat membayar pinjaman mereka dimasa yang akan datang. Demikian halnya dengan perusahaan yang memiliki

permintaan produknya yang cukup tinggi, akan memerlukan dana segar atau kredit baru guna membiayai penambahan kapasitas produksi pabrik yang lebih besar sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen.

Variabel ketiga adalah *variabel tingkat bunga* berhubungan negatif dengan permintaan kredit. Hal ini disebabkan kenaikan tingkat bunga akan merupakan beban biaya yang lebih besar bagi yang meminta kredit. Dapatlah dikemukakan bahwa dengan tingkat bunga yang tinggi, maka permintaan kredit akan turun. Variabel keempat adalah *the cost of equity finance*, suatu perusahaan menjual sahamnya dengan alasan untuk meningkatkan profit perusahaan. Bila penjualan saham tersebut menimbulkan beban biaya pada kekayaan investor keuangan yang besar, sehingga kekayaan mengalami penurunan, maka permintaan kredit akan meningkat. Ekspektasi keuntungan dimasa datang untuk setiap saham dibagi dengan harga belaku menunjukkan beban keuangan bagi perusahaan. Maka permintaan kredit akan meningkat seiring dengan semakin besarnya beban biaya misalnya bagi perusahaan yang mengeluarkan saham.

Variabel kelima, *ekspektasi inflasi*, Ketika ekspektasi masyarakat terhadap inflasi akan meningkat dimasa datang akan meningkatkan permintaan kredit. Bila masyarakat memperkirakan harga-harga barang akan meningkat dimasa datang, mereka akan mengantisipasi dengan meminta kredit karena mereka akan dapat membayar kembali pinjaman dengan uang yang lebih murah, karena real cost rendah. Hal tersebut dimungkinkan

dengan tingkat bunga rendah dibandingkan dengan ekspektasi tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Variabel keenam adalah *ekspansi kebijakan fiskal* misalnya pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah guna membiayai berbagai proyek pemerintah dapat meningkatkan defisit anggaran pemerintah. Ini berarti pemerintah akan memerlukan pinjaman guna menutupi defisit anggaran. Dengan kata lain bahwa kebijakan fiskal akan memberi pengaruh positif terhadap permintaan kredit.

Dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap permintaan kredit (Cathcart, 1982) dengan fungsi :

$$L^D = f (p, y, i, e/p, z, D, \dots)$$

Keterangan:

L^D : Permintaan Kredit

P : Tingkat Harga

Y : Pendapatan riil

I : Tingkat bunga

E/p : Ekspektasi Pendapatan

Z : Ekspektasi Inflasi

D : Kebijakan Fiskal

b. Penawaran Kredit

penawaran kredit dipengaruhi oleh beberapa variabel yang sama seperti yang dikemukakan pada permintaan kredit, namun ada variabel yang berbeda yang mempengaruhi penawaran kredit seperti variabel kebijakan moneter. *Variabel tingkat*

harga merupakan faktor yang berpengaruh positif pada penawaran kredit. Dengan meningkatnya tingkat harga, upah dan pendapatan lain cenderung meningkat, karenanya pendapatan nominal rumah tangga akan meningkat dan hal ini akan mendorong rumah tangga menambah assetnya. Kondisi tersebut memungkinkan penawaran kredit yang lebih besar.

Pendapatan riil merupakan variabel kedua yang berpengaruh positif terhadap penawaran kredit. Kenaikan pendapatan riil berpengaruh pada penawaran kredit melalui mekanisme dimana rumah tangga dan perusahaan dapat meningkatkan kebutuhannya sehingga ketika mereka menginginkan kredit dimungkinkan karena adanya kemampuan untuk membayar kredit yang diterima.

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi penawaran kredit adalah *variabel tingkat bunga*. Kenaikan tingkat bunga akan berpengaruh positif pada penawaran kredit, meningkatnya tingkat bunga akan mendorong rumah tangga dan perusahaan untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, sehingga pihak perbankan akan memiliki dana yang cukup besar guna meningkatkan jumlah penawaran kredit. Variabel keempat adalah *ekspektasi pendapatan* jika pihak yang memerlukan dana berharap akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Bila ekspektasi pendapatan diharapkan cukup baik misalnya dengan mengeluarkan saham dibandingkan dengan beban kredit yang direncanakan, maka hal tersebut berpengaruh negatif pada penawaran kredit.

Variabel kelima *ekspektasi inflasi* berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit. Hal tersebut dapat terjadi bila ekspektasi inflasi meningkat sehingga mengurangi ekspektasi pendapatan riil pada investasi keuangan. Variabel *kebijakan moneter* mempengaruhi penawaran kredit. Dengan mengurangi *reserve requirements* dapat memberikan kelonggaran dana (*loanable funds*) bagi bank umum untuk menawarkan kredit.

Jadi kebijakan moneter melalui ekspansi moneter atau kebijakan uang longgar (*easy monetary policy*) dapat mempengaruhi penawaran kredit yang lebih besar. Fungsi penawaran kredit dapat disimpulkan, variabel yang berpengaruh (Cathcart, 1982) sebagai berikut :

$$L^S = f (p, y, i, e/p, z, A, \dots)$$

Keterangan:

L^S : Penawaran Kredit

P : Tingkat Harga

y : Pendapatan riil

I : Tingkat bunga

E/p: Ekspektasi Pendapatan

Z : Ekspektasi Inflasi

A : Kebijakan Moneter

Bila dilihat pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yaitu apabila terjadi ekspansi kebijakan baik pada kebijakan fiskal maupun moneter akan memberikan dampak yang positif. Ekspansi kebijakan fiskal memberikan dampak yang positif terhadap

permintaan kredit, karena dengan ekspansi kebijakan fiskal ini pemerintah justru membutuhkan dana akibat defisit anggaran. Demikian halnya dengan ekspansi kebijakan moneter akan meningkatkan penawaran kredit, karena bank-bank umum memiliki kelonggaran dana untuk ditawarkan ke masyarakat akibat adanya perluasan kebijakan moneter.

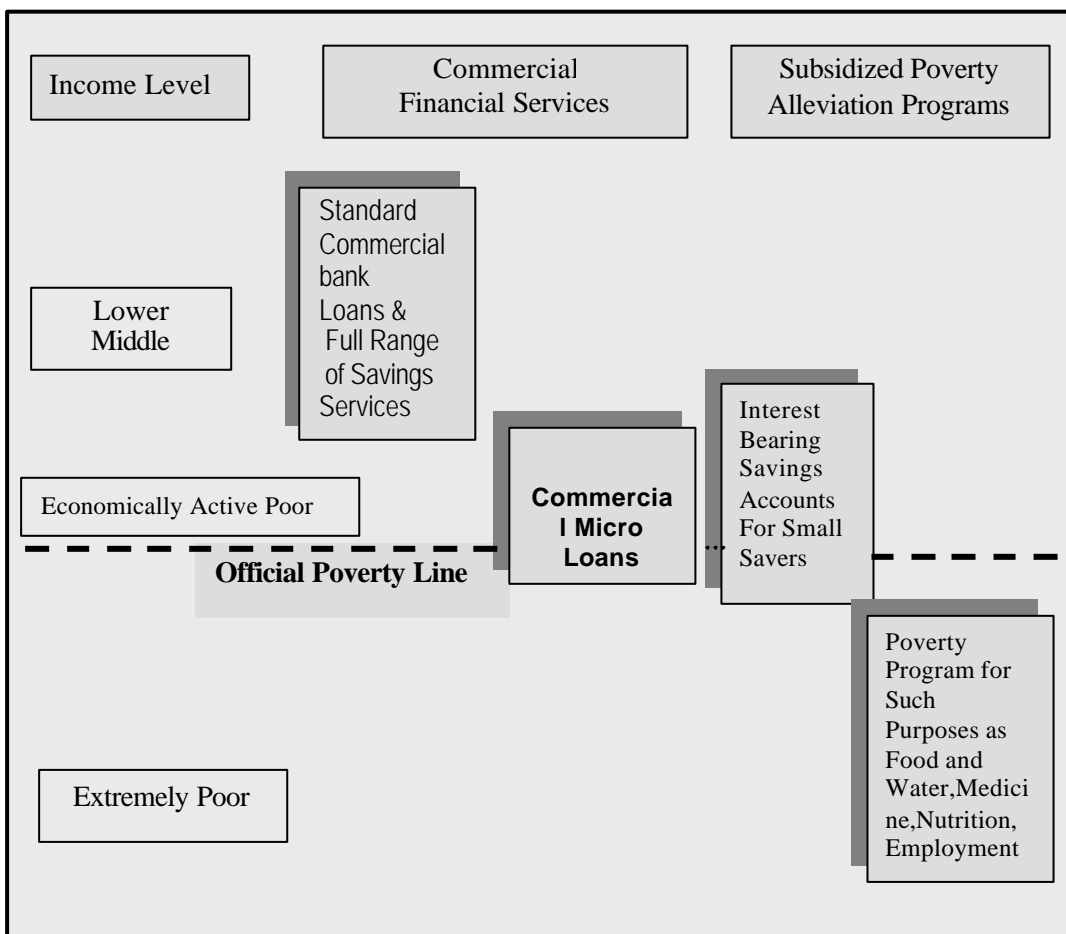
B. Layanan Keuangan Mikro

Layanan keuangan mikro merupakan layanan keuangan yang mencakup tabungan, kredit, transfer uang, dan asuransi dan lain-lain yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan yang berpendapatan rendah (Fernando, 2004). Dalam pengertian tersebut dikemukakan bahwa layanan keuangan khususnya untuk layanan kredit tidak dimaksudkan untuk masyarakat yang sangat miskin, akan tetapi layanan kredit tersebut bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha dalam pengertian bila diberikan kredit akan mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan mengembalikan utangnya.

Bagi masyarakat sangat miskin (*the poorest of the poor*) tidaklah menjadi tanggung jawab layanan keuangan, akan tetapi dilakukan atau memberikan layanan lain yang tepat untuk mereka yang benar-benar sangat miskin. Dengan kata lain bahwa strategi untuk masyarakat miskin yang tidak akan mampu memutar kredit yang diberikan haruslah diberikan strategi lain misalnya dengan bantuan pangan, kesempatan kerja, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Pemberian layanan keuangan (kredit) justru tidak akan menguntungkan bagi lembaga keuangan, sebab pemberian kredit kepada

masyarakat yang sangat miskin tidak dimungkinkan bagi mereka untuk memutar atau mengembangkan uang yang diterima sehingga dengan pertimbangan tersebut kredit tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang sangat miskin.

Robinson (2001) mengemukakan bahwa keuangan mikro menyangkut layanan keuangan kepada usaha mikro yaitu layanan kredit dan tabungan. Layanan keuangan ini diperuntukkan kepada para petani dan peternak; yang menjalankan usaha mikro, atau usaha mikro yang memproduksi barang, mengolah kembali, memperbaiki, atau menjualnya; dan juga layanan mikro diberikan kepada penyedia jasa.



Gambar 2. Layanan Keuangan Mikro Kepada Penduduk Miskin

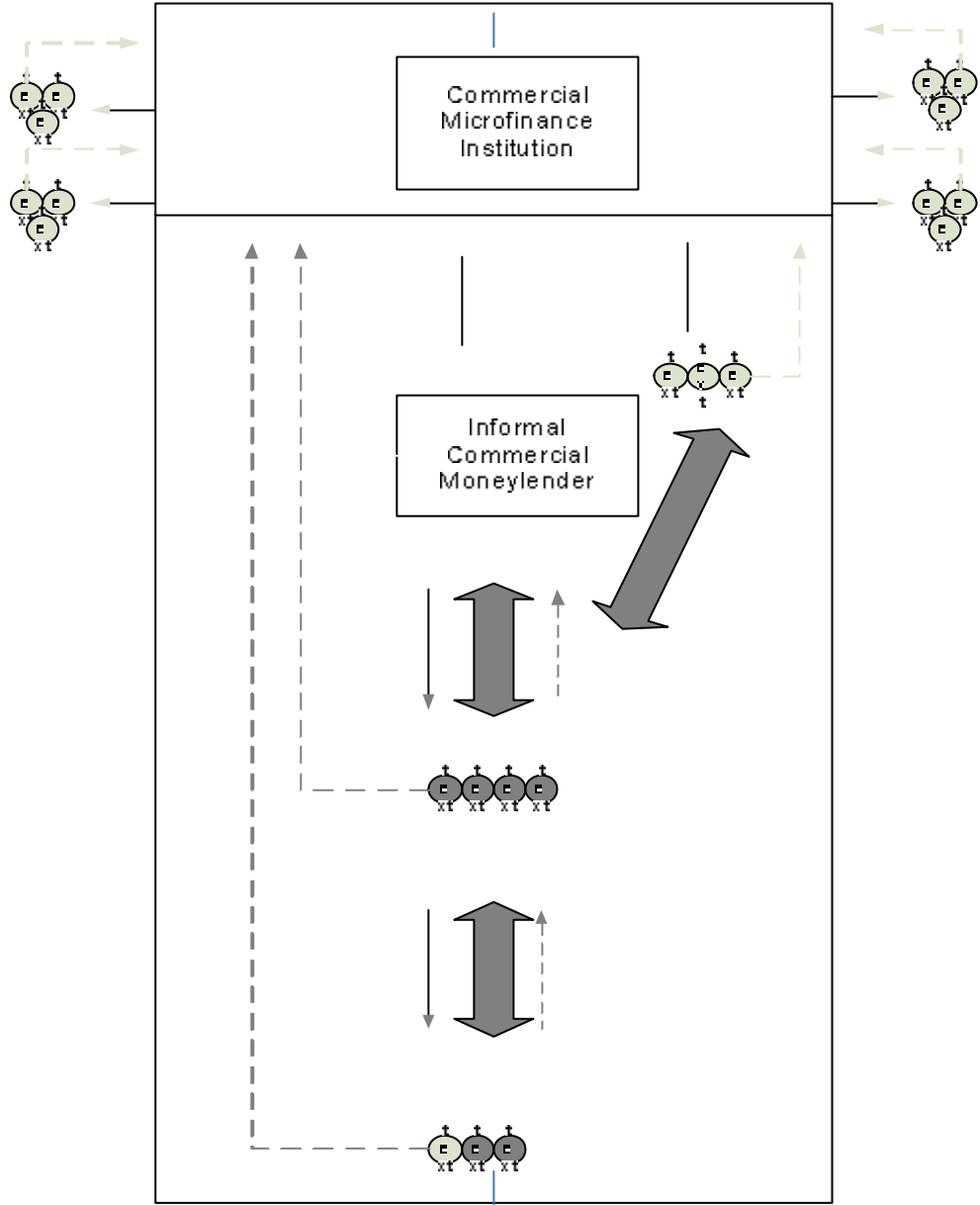
Sumber: Robinson,2001

Pada Gambar 2, menunjukkan bahwa pada level *lower income* (*Vulnerable*) layanan keuangan yang tepat untuk diberikan yaitu *standart commercial* dan sebagian dapat diberikan *commercial microloans*. Untuk *economically active poor* (pengusaha mikro) dan sebagian kecil *extremely poor* lebih tepat diberikan *commercial micro loans* sebab pengusaha mikro memiliki kemampuan untuk mengembangkan pinjaman yang diterima dan dapat meningkatkan aktivitas produksinya. Kepada *extremely poor* yaitu penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan maka yang tepat tidak dalam bentuk layanan keuangan, akan tetapi dengan memberikan program subsidi dari pemerintah dalam bentuk penyediaan makanan, kesehatan, gizi, kesempatan kerja dan pelatihan dan fasilitas lainnya yang mendukung kebutuhan dasar mereka.

Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), (2004) mengemukakan bahwa keuangan mikro berarti layanan bagi keluarga miskin dengan memberikan kredit mikro untuk membantu mereka dalam aktivitas produksi atau mengembangkan usaha mikro mereka dan memberikan kemudahan akses kelembaga keuangan tradisional untuk layanan menabung, kredit dan asuransi.

Nasabah keuangan mikro adalah mereka yang berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses kelembaga keuangan formal. Nasabah tersebut umumnya pekerja

bebas (*self-employed*), usaha mereka didasari pada usaha rumah tangga atau juga sebagai petani kecil di pedesaan.



Gambar 3. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Formal dan Non Keuangan.

Formal Dalam Memberikan Layanan

Sumber: Robinson (2001)

Keterangan:

- = Nasabah Lembaga Formal
- = Peminjam non formal yang beralih pada lembaga formal
- = Peminjam pada lembaga non formal
- ↓ ↑ = Peminjam Kredit
- ⋯ = Penabung
- ↕ = Transaksi pinjaman pada pasar non formal
- ↑ = Transfer informasi

Pada Gambar 3, menunjukkan adanya keterkaitan antara lembaga keuangan *formal* dan *non formal*. Dimana hampir setiap orang menginginkan agar uang yang dimilikinya memiliki rasa aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan, karena itu masyarakat menyimpan uangnya di lembaga keuangan formal, termasuk pemilik dana yang biasa memberikan pinjaman pada masyarakat (*moneylender*). Pinjaman pada lembaga keuangan formal mengalir kepada baik yang memang nasabah bank formal juga mengalir terhadap *moneylender*.

Keberadaan lembaga keuangan mikro atau *micro finance institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani lembaga keuangan formal. Jadi target atau segmen keuangan mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau yang berpenghasilan rendah. Bank Rakyat Indonesia yang memberikan layanan mikro melalui BRI Unitnya memberi definisi keuangan mikro sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta (Rudjito, 2002).

Asian Development Bank (ADB), (2000) memberikan definisi “*microfinance* sebagai ketersediaan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, transfer uang dan asuransi bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan bagi usaha mikro”. Sumber layanan keuangan mikro disediakan oleh lembaga formal seperti rural bank dan koperasi; lembaga semiformal seperti *non goverment organization*; dan informal seperti *money lenders*.

Berkembangnya keuangan mikro dalam melayani masyarakat miskin tidak terlepas dari peran lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sebuah organisasi yang menawarkan layanan keuangan mikro kepada pengusaha mikro dan kecil yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Layanan tersebut dapat berupa tabungan, kredit, asuransi, dan lain-lain.

Dalam kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro dibagi yang berwujud bank dan non bank. Untuk yang berwujud bank adalah BRI Unit, Bank Perkerkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, Pola pembiayaan grameen, Pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), credit union (Budiantoro, 2003).

Keuangan mikro yang berhubungan dengan pembiayaan atau pemberian kredit mikro diutamakan kepada masyarakat miskin atau yang berpendapatan rendah dan

yang memiliki usaha (usaha mikro) atau bagi mereka yang dapat mengembangkan dana yang diperolehnya sehingga mereka dapat mengembalikan pinjamannya sekaligus pendapatan mereka meningkat. Jadi kredit mikro diutamakan bagi usaha mikro dengan pertimbangan bahwa:

1. Mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti.
2. Apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan dengan mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil.
3. Secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita sendiri, maupun membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda (Ismawan, 2003).

Pada Tabel 6, menunjukkan target pembiayaan keuangan mikro. Dimana keuangan mikro memberikan kredit kepada usaha mikro yaitu penduduk miskin yang secara ekonomis akan mampu mengembangkan dana yang diterimanya, sehingga dapat meningkatkan usahanya atau pendapatannya dan tentu saja diharapkan dapat mengembalikan utangnya kepada lembaga keuangan mikro. Dalam tabel tersebut *economically active poor* (usaha mikro) yang diprioritaskan untuk mendapat layanan mikro.

Tabel 7. Target Pembiayaan Keuangan Mikro

	The Elder Poor	
The Poorest	Economically Active Poor (usaha mikro)	Small Scale Business
	The Younger Poor	

Sumber : *World Bank* (dalam Ismawan, 2003).

Pada kelompok masyarakat *the poorest* adalah kelompok masyarakat dengan pendapatan yang sangat rendah sehingga kepada mereka bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan dalam bentuk layanan keuangan. Sedangkan kelompok *the elder poor* adalah kelompok masyarakat yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas berusaha (kelompok usia diatas 60 tahun, tidak memiliki pendapatan tetap) dan kepada mereka lebih tepat diberikan bantuan sosial, *the younger poor* adalah kelompok dimana kepada mereka (kelompok usia dibawah 15 tahun, belum memiliki penghasilan tetap) bantuan yang tepat adalah dalam bentuk investasi sumber daya manusia seperti pendidikan yang layak dan pemeliharaan kesehatan, dan *small scale business* adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dari usaha mikro sehingga kepada mereka lebih tepat diberikan layanan keuangan komersil.

Lembaga keuangan mikro tentunya mengharapkan pengembalian dana yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat miskin untuk kelanjutan atau

kelangsungan aktivitas lembaga keuangan mikro. Untuk menjalankan lembaga keuangan mikro diperlukan biaya operasional dan juga diperlukan dana yang tersedia bagi peminjam baru. Karena itulah layanan keuangan mikro (kredit) diutamakan kepada mereka yang memiliki usaha yang dapat mengembangkan pinjaman tersebut.

Sumodiningrat (2003) mengemukakan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu dilihat target penduduk miskin yang akan diberikan bantuan. Penduduk miskin harus dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, penduduk miskin yang belum produktif atau usianya kurang dari 15 tahun. Kedua, penduduk miskin yang potensial produktif, yaitu pada masa usia produktif (15-60 tahun). Dan ketiga, penduduk miskin yang usianya diatas 60 tahun.

Untuk penduduk miskin yang belum produktif atau dibawah usia produktif maka program yang tepat adalah yang bersifat investasi sosial. Ini terutama berhubungan dengan masalah pendidikan dan kesehatan. Untuk penduduk yang masuk dalam usia produktif maka program yang tepat adalah bersifat investasi ekonomi yaitu, berupa bantuan permodalan, teknis, dan pendampingan. Untuk kelompok masyarakat miskin yang masuk dalam kategori diatas usia produktif maka programnya bersifat santunan atau jaminan sosial.

Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya. Dalam mengembangkan keuangan mikro agar dapat melayani masyarakat miskin (*economically active poor*) terdapat beberapa alternatif

yang bisa dilakukan (Ismawan, 2004). Alternatif tersebut yaitu model pembiayaan oleh rakyat (*Financing of the poor*), model pembiayaan dengan rakyat (*Financing with the poor*), model pembiayaan untuk rakyat (*Financing for the poor*).

Model pembiayaan oleh rakyat (*Financing of the poor*), bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base, dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga dimasyarakat adalah : *Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*, *Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, *Credit Union (CU)*, *Koperasi Simpan Pinjam (KSP)*, Dll.

Model pembiayaan dengan rakyat (*Financing with the poor*), bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau sering disebut kelompok swadaya masyarakat serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang nature-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*outreaching*) sedang pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan *financial suport*. Di Indonesia dikenal dengan pola sering disebut pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK).

Model pembiayaan untuk rakyat (*Financing for the poor*), bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution* dimana sumber dari financial suport terutama diperoleh bukan dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Bentuk ini seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, dll.

Bentuk pertama; *financing of the poor* menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk kedua; *financing with the poor* lebih menekankan pada fungsi penghubung (*intermediary*) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada. Sedangkan bentuk ketiga; *financing for the poor* menekankan pada penggalangan pada resources yang dijadikan modal yang ditujukan bagi masyarakat miskin.

C. Kaitan Layanan Keuangan Mikro dan Kemiskinan

Sebagaimana diketahui kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Khandker (1998) mengemukakan faktor penyebab utama kemiskinan adalah karena kurangnya kesempatan kerja dan karena rendahnya produktifitas penduduk miskin. Untuk mengatasi keadaan tersebut, ketika kemiskinan diakibatkan oleh kesempatan kerja yang kurang, maka untuk mengurangi kemiskinan perlu penciptaan lapangan kerja baru; dan bila kemiskinan terjadi karena rendahnya pendapatan dan rendahnya produktifitas, maka pengurangan kemiskinan dibutuhkan

investasi pada sumberdaya manusia dan investasi modal fisik untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Jadi jalan terbaik untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kredit mikro kepada penduduk miskin guna menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka.

Microfinance (keuangan mikro) merupakan salah satu solusi pembiayaan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dan menjadi salah satu cara dalam pengurangan atau penanggulangan kemiskinan. Kurmanalieva et al, (2003) mengemukakan keuangan mikro sebagai suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Jika akses kredit dapat dilakukan oleh masyarakat miskin dan digunakan bagi aktifitas produksi maka dimungkinkan peningkatan pendapatan. Untuk pembiayaan keuangan mikro perlu pembedaan antara *chronic poor* dan *transitory poor*. *Chronic poor* adalah kondisi kemiskinan yang telah berlangsung lama dan perlu dibedakan antara miskin yang sifatnya secara fisik dan sosial, sedang *transitory* adalah kemiskinan yang sifatnya temporer yaitu kemiskinan yang terjadi karena perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kaitan dengan program *microfinance* besarnya pemberian kredit kepada masyarakat miskin perlu melihat tingkat masyarakat miskin yang diberikan kredit sebab bila kredit tersebut tidak tepat sasaran justru tidak akan memberikan dampak positif, sementara pemberian kredit diharapkan akan memberikan dampak positif ekonomi masyarakat miskin.

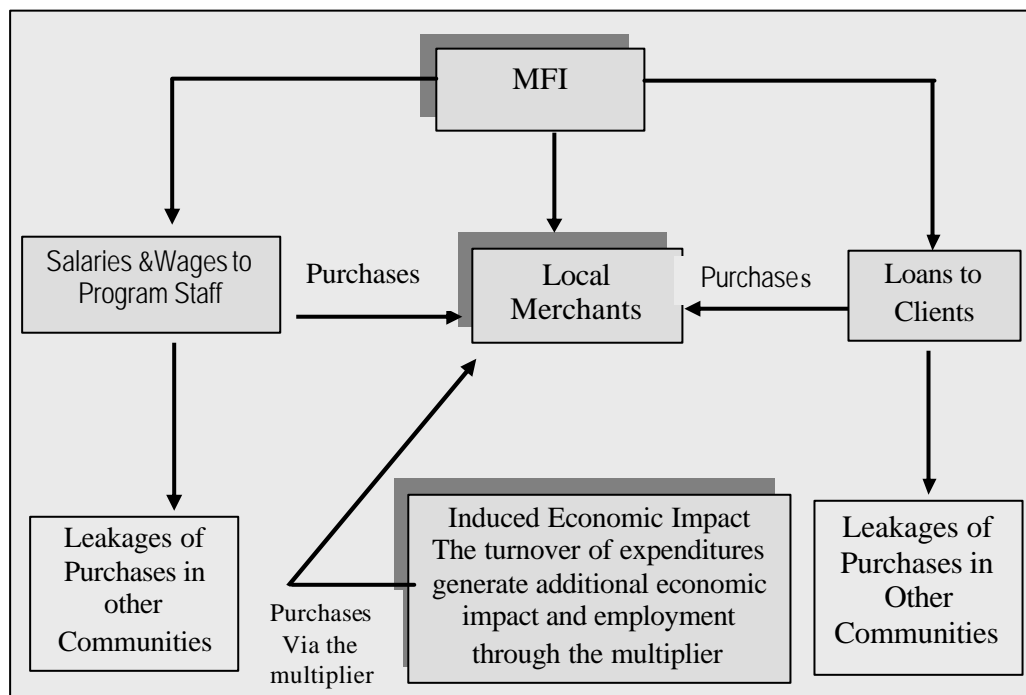
Simanowitz (2004) mengemukakan bahwa program keuangan mikro merupakan salah satu bentuk intervensi yang sangat penting dinegara berkembang dalam mengurangi kemiskinan.

Kredit dapat memberikan dampak kepada peminjamnya, tetapi akan memberikan dampak yang berbeda kepada masyarakat miskin (*the poor*) dengan masyarakat yang sangat miskin (*the poorest*). Pada masyarakat miskin kredit akan berpengaruh secara signifikan bergantung pada status sosial ekonomi, kelas, kasta, dan komposisi keluarga, sedangkan pada masyarakat sangat miskin tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan pendapatan, hal ini disebabkan karena kredit tersebut digunakan hanya untuk konsumsi dan diinvestasikan pada kegiatan yang memberikan tingkat pengembalian rendah (Hulme dan Mosley, 1996: dalam Maclsaac, 1997).

Dampak keuangan mikro dapat dilihat pada empat tingkatan yaitu pada *level individual, household, enterprise, dan community* (Woller and Parsons, undated). Dampak keuangan mikro dapat dilihat dalam jangka panjang. Pinjaman *small scale* akan memberikan dampak: pertama, keuangan mikro dapat meningkatkan pendapatan pengusaha mikro; kedua, keuangan mikro dapat meningkatkan upah pekerja pada sektor informal; dan ketiga, keuangan mikro dapat menyebabkan meningkatnya produksi pada sektor informal (Tschach, 2003).

Woller dan Parsons (tanpa tahun) mengemukakan program keuangan mikro dapat memberikan dampak pada masyarakat (*community*) melalui dua

cara yaitu melalui *direct effect* dan *induced effect*. *Direct economic impact* dimana lembaga keuangan mikro secara langsung mempengaruhi ekonomi lokal atau ekonomi masyarakat melalui tiga cara; (1) melalui pembelian barang dan jasa oleh program tersebut; (2) melalui pembelian barang dan jasa oleh para pekerja; dan (3) melalui pembelian bahan mentah, modal kerja, peralatan, atau kebutuhan lain perusahaan. *Induced economic impact* yaitu pengaruh keuangan mikro terhadap ekonomi masyarakat melalui konsumsi atau sering disebut dampak *income multiplier*. Keadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. Dampak Keuangan Mikro Pada Masyarakat

Sumber: Woller dan Parsons (tanpa tahun).

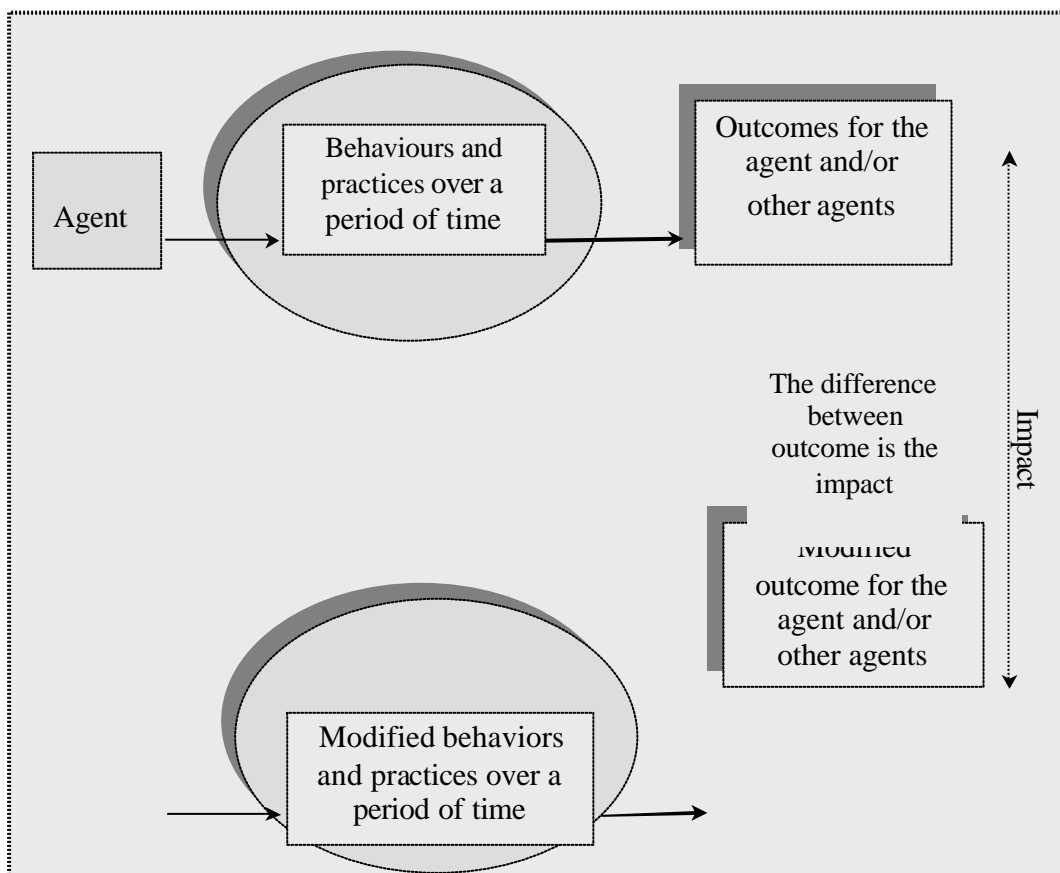
Efek multiplier bekerja melalui cara sebagai berikut: A bekerja pada lembaga keuangan mikro (MFI) dan membelanjakan gajinya pada ekonomi lokal. Ini dapat menciptakan permintaan barang dan jasa. Permintaan tersebut menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi B. Selanjutnya B akan membelanjakan pendapatannya pada barang dan jasa, sehingga tercipta tambahan permintaan dan akan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi si C. Keadaan tersebut akan berlangsung terus. Seperti yang terjadi pada pengeluaran secara langsung oleh MFI juga terjadi hal yang serupa pada clients.

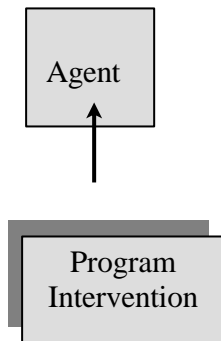
Dampak ekonomi pada masyarakat (*community*) terjadi dengan adanya pembelanjaan yang dilakukan oleh lembaga microfinance, pembelanjaan yang dilakukan oleh staff MFI dengan gaji yang diterima, dan pembelanjaan yang dilakukan oleh clients atas kredit yang diterima dari MFI. Dampak ekonomi tersebut juga sebagai akibat adanya dorongan atau efek multiplier terhadap ekonomi masyarakat dengan adanya permintaan barang dan jasa.

Hulme (1997) mengemukakan kerangka konseptual. Ada tiga elemen kerangka konseptual yaitu *model impact chain*, spesifikasi unit atau level penilaian dampak keuangan mikro, dan spesifikasi jenis dampaknya yang dinilai. Program keuangan mikro merupakan bentuk intervensi yang dapat merubah perilaku agents (*individuals, households, enterprises, communities*) untuk pencapaian keinginan yang diharapkan (*outcome*). Jadi dampak

keuangan mikro disini dapat dilihat dari *outcome* yang terjadi yaitu perbedaan yang ada antara yang mendapatkan intervensi (*agents*) dengan yang tidak mendapatkan intervensi program keuangan mikro lihat Gambar 5, menunjukkan efek keuangan mikro.

Intervensi program diharapkan dapat merubah perilaku *individual, household, enterprise, dan community* untuk periode waktu tertentu, sehingga dapat dilihat dampak adanya program keuangan mikro yang diberikan kepada *agents* dengan membandingkan *agents* yang tidak mendapatkan program keuangan mikro .





**Gambar 5. Model Jalur Dampak Keuangan Mikro
Sumber: Hulme (1997).**

Mekanisme pengaruh microfinance melalui pemeberian pinjaman kepada misalnya suatu usaha, hal ini dapat merubah prilaku aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh rumah tangga, sehingga dapat menambah pendapatan anggota rumah tangga. Perubahan tersebut dapat membawa perubahan status pendidikan, keadaan ekonomi, status sosial dimasyarakat.

Tabel 8. Unit Penilaian Dampak Keuangan Mikro, Kelebihan dan Kekurangan

Unit	Advantages	Disadvantages
Individual	- Easily defined and identified	- Most interventions have impacts beyond the individual - Dificulties of disagregating group impacts

		and impacts on relation
Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> - Availability of analytical tools (profitability, return on investment) 	<ul style="list-style-type: none"> - Definition and identification is difficult in microenterprises - Much microfinance is used for other enterprises - Links between enterprise performance and livelihoods need careful validation
Household	<ul style="list-style-type: none"> - Relatively easily defined and identified - Permits an appreciation of livelihood impacts - Permits an appreciation of interlinkages of different enterprises and consumption 	<ul style="list-style-type: none"> - Sometimes exact membership difficult to gauge - The assumption that what is good for a household in aggregate is good for all of its members individually is often invalid

Community	- Permit mayor externalities of interventions to be captured	- Quantitative data s difficult to gahter - Definition of its boundary is arbitrary
------------------	---	--

Sumber: Hulme (1997).

Spesifikasi penilaian dampak keuangan mikro dapat dilihat dari *unit level individual, household, enterprise, dan community*. Pengaruh yang ditimbulkan oleh program keuangan mikro pada tiap level tersebut pada Tabel 8. Sedang spesifikasi jenis dampak keuangan mikro yaitu dengan melihat indikator ekonomi dan indikator sosial.

Indikator ekonomi seperti perubahan pendapatan, pola pengeluaran, konsumsi, dan asset. Indikator yang paling kuat untuk dijadikan penilaian dampak adalah variabel asset, sebab fluktuasi ekonomi tidak berpengaruh seperti pada indikator lainnya (Barnes, 1996: dalam Hulme, 1997).

Indikator sosial seperti status pendidikan, akses pada pelayanan kesehatan, gizi, dan penggunaan kontrasepsi merupakan bentuk penilaian dampak keuangan mikro (Hashemi at al, 1995: dalam Hulme, 1997).

Marr (2001) mengemukakan kerangka analisis dampak keuangan mikro terhadap pengurangan kemiskinan. Analisis dampak keuangan

mikro dapat dilakukan pada lima level: *Level group*, dimana anggotanya secara bersama-sama bergabung untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan mikro; *level individual*, *level household*, dan *level community*.

Pada level group, ada tiga dampak yang perlu dipertimbangkan yaitu *financial sustainability*, *organisational sustainability*, dan stabilitas hubungan antara anggota kelompok dengan petugas layanan keuangan mikro. Pada *level individual*, ada empat dampak yang perlu dipertimbangkan yaitu dampak yang berwujud dan tidak berwujud seperti akumulasi asset, peningkatan skill, pemberdayaan, dan penghargaan diri (*self-esteem*).

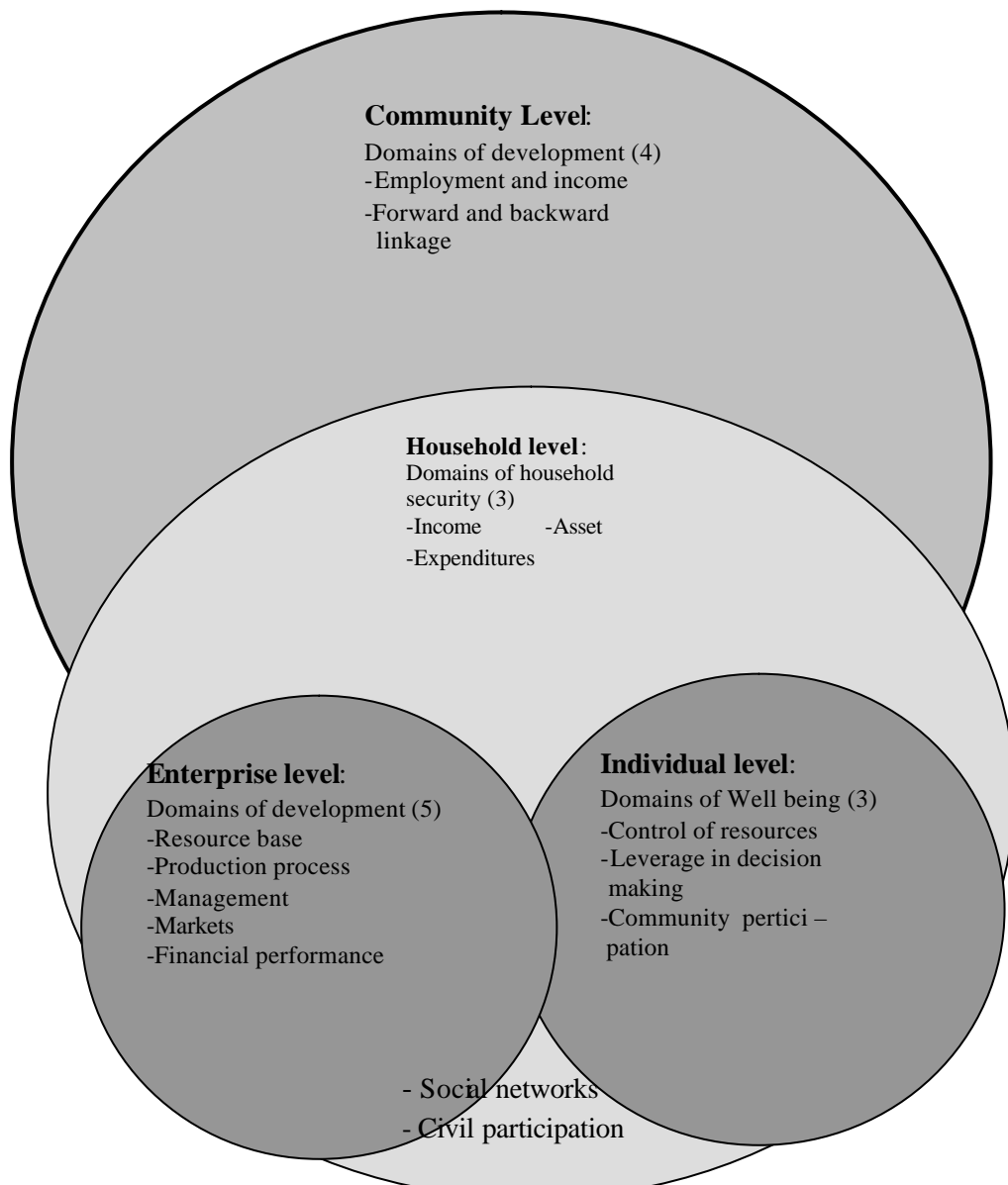
Pada level household, ada empat dampak yang dapat dipertimbangkan yaitu akumulasi asset, investasi jangka panjang, *consumption smooting (Stability and growth of consumption)*, dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Pada level enterprise* dampaknya mencakup keberadaan perusahaan, diversifikasi aktivitas usaha, manajemen usaha, kesempatan kerja, dan perubahan teknologi. *Pada level community* dampaknya mencakup organisation kemasyarakatan, interaksi vertikal dan horisontal antara pengusaha dengan lembaga pemerintah, pemberdayaan masyarakat pada level pedesaan, pasar keuangan, pasar tenaga kerja, dan pasar barang dan jasa.

Pelayanan keuangan mikro memainkan peran yang penting bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses ke lembaga keuangan formal, terutama peran pelayanan keuangan dalam membangun asset perusahaan, individu atau rumah tangga. Peranan pelayanan keuangan dalam membangun asset dalam beberapa cara:

- (1) Pinjaman digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam mengakumulasi asset produktif. Pinjaman juga dapat digunakan untuk investasi pada sumber daya manusia seperti kesehatan dan pendidikan. Asset dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan atau akumulasi asset selanjutnya.
- (2) Pelayanan keuangan dapat membantu rumah tangga dalam mengatur asset atau mengurangi utangnya. Akses ke layanan keuangan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh rumah tangga. Adanya kebutuhan yang tiba-tiba dapat diatasi oleh rumah tangga atau individu dengan memanfaatkan akses kelayanan keuangan mikro tanpa menjual misalnya asset produktif yang dimiliki.
- (3) Peranan program keuangan mikro dalam layanan keuangan dan sosial intermediasi seperti membangun asset sumber daya manusia dengan meningkatkan kepercayaan diri, bargaining power sehingga mereka memiliki kesempatan dalam menduduki posisi

kepemimpinan dalam masyarakat atau memiliki jaringan luas dalam berbagai institusi dalam masyarakat (Chua, et al, 2000).

Pada Gambar 6, menunjukkan kerangka konseptual dampak microfinance pada level yang dipengaruhi dalam kaitan pengurangan kemiskinan. Dengan menggunakan *conceptual framework* Todd (2000), melihat dampak keuangan mikro dengan menempatkan *household* sebagai yang utama dalam analisisnya, sebab pemanfaatan utang bergantung pada hambatan keluarga dalam mengatasi ekonominya. Selain *Household* atau analisis dampak keuangan mikro juga terjadi pada level individu, level usaha, dan level masyarakat.



Gambar 6. Kerangka Konseptual Dampak Keuangan Mikro

Sumber: Todd (2000)

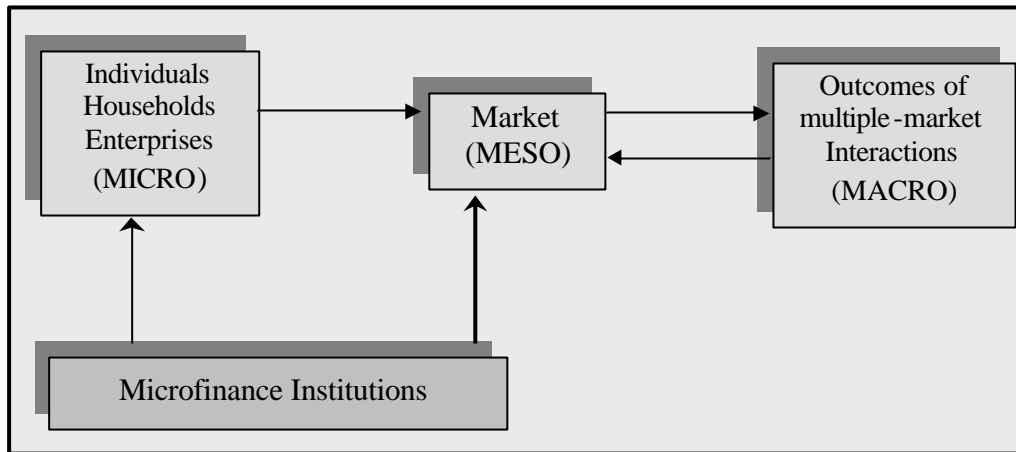
Pada level individu dimana adanya pemberdayaan individu dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahterannya dan

memiliki interaksi dalam kegiatan sosial dimasyarakat. Sedangkan pada *level community* adanya akses kelayanan mikro dapat meningkatkan status sosial dimasyarakat dan adanya partisipasi khususnya wanita dimasyarakat.

Sedang pada level usaha pinjaman kredit lebih pada pemanfaatan utang tersebut untuk meningkatkan produksi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas, misalnya dalam penciptaan lapangan kerja baru dan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dampak keuangan mikro yang lebih luas (*wider impacts*) dikemukakan oleh (McGregor, 2000:dalam Zohir dan Matin, 2002) bahwa keuangan mikro memiliki dampak ekonomi dan non-ekonomi seperti sosial, budaya, dan politik. Dampak tersebut akan berinteraksi pada level lokal, regional, dan nasional. Dampak pada bidang ekonomi dapat dilihat pada perubahan kondisi rumah tangga dan pasar. Perubahan dampak ekonomi terjadi pada level aktivitas *micro*, *meso*, dan *macro* ekonomi (lihat Gambar 7).

Perubahan yang terjadi pada level mikro dapat berpengaruh pada perubahan kondisi pasar (*meso*) yang pada akhirnya terjadinya interaksi pada level makro. Pada level mikro dimana keuangan mikro akan mempengaruhi kondisi *individual*, *household* dan *enterprise* seperti perubahan tingkat pendapatan, upah, dan harga.

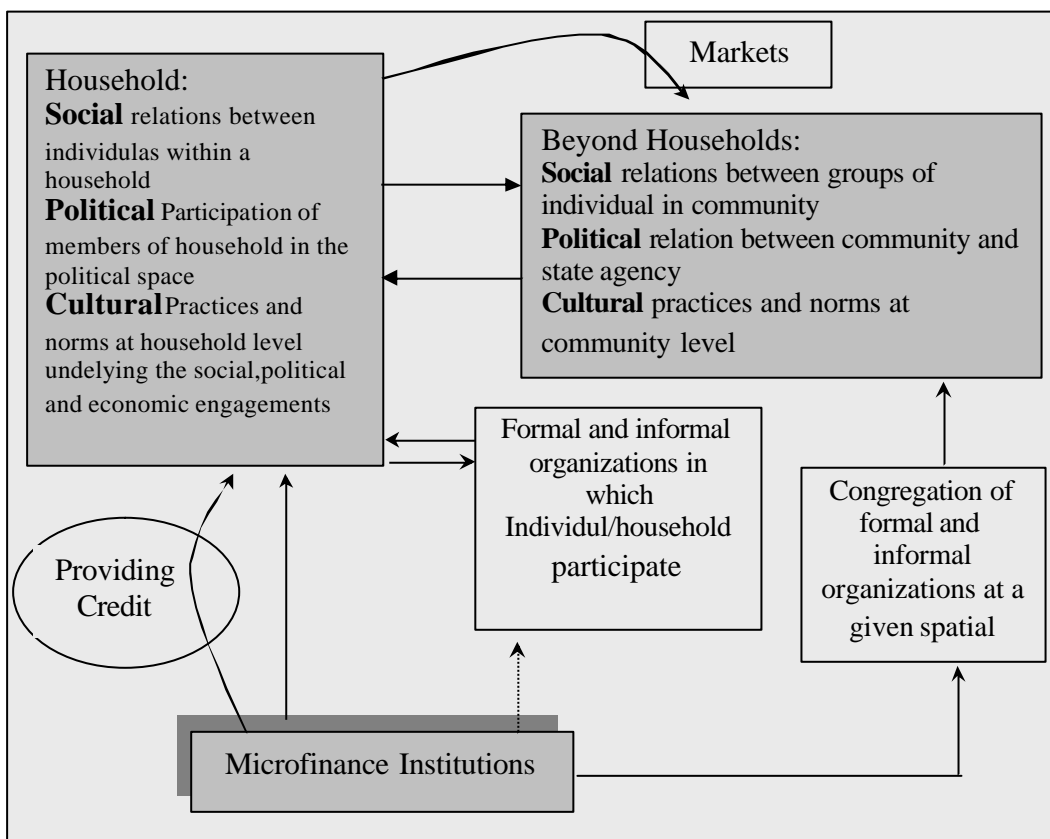


Gambar 7. Dampak Keuangan Mikro Pada Level Mikro, Meso dan Makro
Sumber : Zohir dan Matin (2002).

Pada Gambar 8, menunjukkan dampak non-ekonomi dari keuangan mikro terjadi melalui *household*, dimana dampak non-ekonomi seperti sosial, politik dan budaya terjadi akibat adanya interaksi yang lebih luas dimasyarakat yang dilakukan oleh individu dan masyarakat, interaksi tersebut dapat melalui partisipasi dalam agenda kegiatan politik, dan dalam mengikuti norma atau budaya yang berlaku dilingkungan yang menerima layanan keuangan mikro, tentunya dalam hal ini interaksi terjadi melalui organisasi formal maupun non formal dimasyarakat.

Dampak sosial pada *household* dengan adanya lembaga keuangan mikro ditunjukkan dengan perubahan pada variabel sosial seperti tingkat pendidikan, kualitas perumahan, tingkat kesehatan

keluarga, dan pemeliharaan kesehatan dan lingkungan. Interaksi individu dalam kelompok masyarakat merupakan bagian dari dampak yang ditimbulkan oleh adanya lembaga keuangan mikro. Partisipasi dalam kegiatan politik misalnya dalam menggunakan hak untuk memilih dalam sebuah pemilihan merupakan dampak yang lebih luas dengan adanya intervensi melalui layanan keuangan mikro, dimana individu yang terlibat dalam kelompoknya memiliki kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan atau alokasi sumberdaya pada level daerah.



Gambar 8. Dampak Keuangan Mikro Pada Aktivitas Non-Ekonomi

Sumber: Zohir and Matin (2002).

Keberadaan keuangan mikro dapat merubah budaya atau persepsi dalam masyarakat seperti yang seharusnya mencari nafkah adalah kaum lelaki, akan tetapi dengan adanya keuangan mikro telah merubah budaya tersebut dimana kaum wanita telah banyak terlibat dalam meningkatkan ekonomi keluarga, bahkan keterlibatan wanita tidak hanya terbatas pada peningkatan ekonomi keluarga, akan tetapi mereka telah terlibat dalam kelompok-kelompok masyarakat. Keterlibatan tersebut dalam interaksi sosial kemasyarakatan dan keterlibatan wanita dalam penggunaan hak politiknya dalam pemilihan. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya dalam masyarakat terutama pada wanita.

Latifee (2000) mengemukakan keuangan mikro memiliki dampak ekonomi, sosial, dan politik terhadap peminjamnya. Akumulasi modal, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan merupakan dampak ekonomi. Dampak sosial bagi masyarakat miskin mereka memiliki akses terhadap kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan layanan sosial lainnya.

Gambaran lebih luas Latiffe mengenai dampak adanya keuangan mikro yaitu dijelaskan dalam hubungannya dengan tenaga kerja wanita sebelumnya mereka terikat atau terbatas hanya pada pekerjaan rumah tangga, sekarang dengan adanya program keuangan mikro mereka terlibat diluar aktivitas ekonomi keluarga dan mereka terlibat dalam kelompoknya yang memberi kesempatan bagi wanita dalam memimpin organisasi.

Kebebasan berbicara, kebebasan memilih, kebebasan memilih yang diperlukan dalam kegiatan public merupakan bentuk keterlibatan masyarakat miskin dalam menggunakan hak dan kewajiban politiknya.

D. Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB) lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Bentuk LKM dapat berupa lembaga formal, lembaga semi formal, sumber-sumber informal seperti pelepas uang (*money lender*).

Lembaga Keuangan Mikro mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka lembaga tersebut dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan mikro sebagai intermediasi khususnya kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk tujuan produktif, akan dapat memberikan dampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Pinjaman kredit mikro merupakan suatu cara yang tepat untuk memutus masalah kelangkaan modal yang umum dialami oleh para pengusaha. Marsuki (2005) mengemukakan salah satu persoalan penting yang sering dianggap sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan berusaha bagi UKM adalah masalah permodalan.

Menurut Marguiret Robinson (2001) pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif; Kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin tapi memiliki kegiatan yang produktif (*economically active working poor*), dan yang ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan yang dimiliki, sehingga

sasaran yang ingin dicapai tepat sasaran. Pendekatan bagi kelompok yang pertama lebih tepat dengan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi dan penciptaan lapangan kerja baru. Sedang kelompok yang kedua dan ketiga lebih tepat dengan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan UKM dan pengembangan berbagai jenis pinjaman yang dapat mempermudah akses kelompok tersebut.

E. Layanan Keuangan Mikro dan Jenis Usaha

Sebagai ide awal dari keberadaan keuangan mikro adalah untuk melayani *microenterprise* atau usaha mikro. Namun dalam kenyataan penyaluran pinjaman dari lembaga keuangan mikro di Indonesia, usaha mikro termasuk dalam kategori usaha kecil. Bank-bank secara umum tidak membedakan antara pengusaha dan perusahaannya sebagai contoh pada bank BNI dan BRI memberikan kredit dibawah Rp 50 juta dikategorikan kedalam kredit mikro yang diberikan kepada pengusaha kecil sebagai bagian dari portofolio kredit usaha kecil dan menengah (Heryadi, 2004).

Beberapa batasan atau definisi usaha mikro dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Bank Dunia* memberikan definisi usaha mikro sebagai perusahaan perorangan dengan total asset < USD 100,000 dan mempekerjakan dibawah sepuluh orang (<10 orang). Sementara itu, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha dengan total

penjualan mulai dari USD 100,000 hingga USD 3 juta dan mempekerjakan 10-50 orang.

2. *Komite penanggulangan kemiskinan (KPK)* nasional Indonesia mendefinisikan pengusaha mikro sebagai pemilik atau mereka yang menjalankan perusahaan berskala mikro dalam seluruh sektor ekonomi, yang memiliki aset maksimum Rp 25 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.
3. *UU No. 9/1995 tentang usaha kecil (UKM)* mendefinisikan usaha mikro secara implisit merupakan bagian dari usaha kecil dengan total kekayaan maksimum Rp. 200 juta (diluar tanah dan bangunan) dan penjualan pertahun < Rp 1 milyar.
4. *Biro Pusat Statistik* memberikan definisi usaha mikro berdasarkan jumlah pekerja yaitu < 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Dalam studi ini akan menggunakan definisi BPS, dengan pertimbangan bahwa definisi ini lebih mencerminkan dengan kondisi usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk miskin.
5. *Bank Indonesia* (SK Dir. No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 mei 1998) menggambarkan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin dengan sumber daya lokal dan teknologi sederhana serta lapangan usaha mudah untuk dimasuki namun juga mudah untuk ditinggalkan.

1. Karakteristik Usaha Mikro

Komite Penanggulangan Kemiskinan (2002) mengemukakan bahwa usaha mikro umumnya bergerak pada bidang perdagangan, jasa, pertanian, dan manufaktur yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang bercirikan:

- a. Dimiliki oleh keluarga
- b. Mempergunakan teknologi sederhana
- c. Memanfaatkan sumberdaya lokal
- d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan di tinggalkan.
- e. Jumlah kredit:

Untuk kredit pertama diberikan sampai Rp. 2.000.000. Untuk nasabah pengusaha mikro tertentu yang usahanya berkembang pesat dapat dipertimbangkan pemberian kredit secara bertahap sampai dengan Rp. 5.000.000.

Ismawan (2004) mengemukakan karakteristik usaha mikro sangat beragam, namun setidaknya usaha mikro dapat dikonstruksikan dengan karakteristik dasar yaitu *informalitas, mobilitas, beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga, kemandirian.*

Informalitas, sebagian besar ekonomi rakyat bekerja di luar kerangka legal dan pengaturan (*legal and regulatory framework*) yang ada. Ketiadaan maupun kelemahan aturan yang ada atau ketidakmapuan pemerintah untuk mengefektifkan peraturan yang ada, menjadi ruang yang membuat ekonomi rakyat bisa berkembang. Intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi rakyat justru akan membuat ekonomi rakyat tidak berkembang.

Mobilitas, aspek informalitas dari ekonomi rakyat juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktivitas yang dijalani. Berbagai kebijakan pemerintah dapat secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu aktivitas

ekonomi rakyat. Dalam merespon kondisi yang demikian, sektor ekonomi rakyat merupakan sektor yang relatif mudah untuk dimasuki dan ditinggalkan. Apabila suatu aktivitas ekonomi terdapat banyak peluang yang menguntungkan, maka dengan segera para pelakunya akan berpindah menekuninya, sebaliknya bila terjadi perubahan yang tidak menguntungkan maka para pelaku ekonomi akan berpindah pada jenis usaha lain.

Beberapa perkerjaan dilakukan oleh satu keluarga, adanya kenyataan bahwa dalam satu keluarga, terutama yang berada pada strata bawah, umumnya keluarga tersebut melalui anggotanya terlibat pada lebih dari satu aktivitas ekonomi yang dapat digolongkan sebagai ekonomi rakyat. Keadaan ini mereka lakukan, karena *insecuritas* dan keberlanjutan ekonomi rakyat sulit untuk diprediksi, menyebabkan pelakunya membuat beberapa alternatif yang dapat menggantikan apabila suatu aktivitas ekonomi tidak dapat dilanjutkan. Apabila tidak terjadi sesuatu, maka akumulasi keuntungan pendapatan dari beberapa aktivitas ekonomi sangat dibutuhkan untuk menunjang ekonomi keluarga.

Kemandirian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh sektor ekonomi rakyat, baik keterbatasan sumber daya manusia maupun keterbatasan modal untuk pengembangan usaha, dipandang *unbankable* dan *high risk* sehingga akses ke lembaga perbankan sangat terbatas. Sektor ekonomi rakyat mengembangkan usahanya dengan modal sendiri, karena kesulitan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan formal. Ketika terjadi krisis ekonomi, sektor ekonomi rakyat relatif tidak mengalami gangguan yang berarti. Hal inilah kemandirian yang dimiliki

oleh sektor ekonomi rakyat membuat mereka tetap eksis ketika terjadi krisis ekonomi. Bila dilihat dari struktur modal usaha sektor ekonomi rakyat yaitu industri rumah tangga (IKR) 90,36% dan industri kecil (IK) 69,82% adalah bersumber dari modal sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/185/Kep/Dir. tanggal 5 Mei 1998 tentang proyek kredit mikro, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin yang mempunyai ciri:

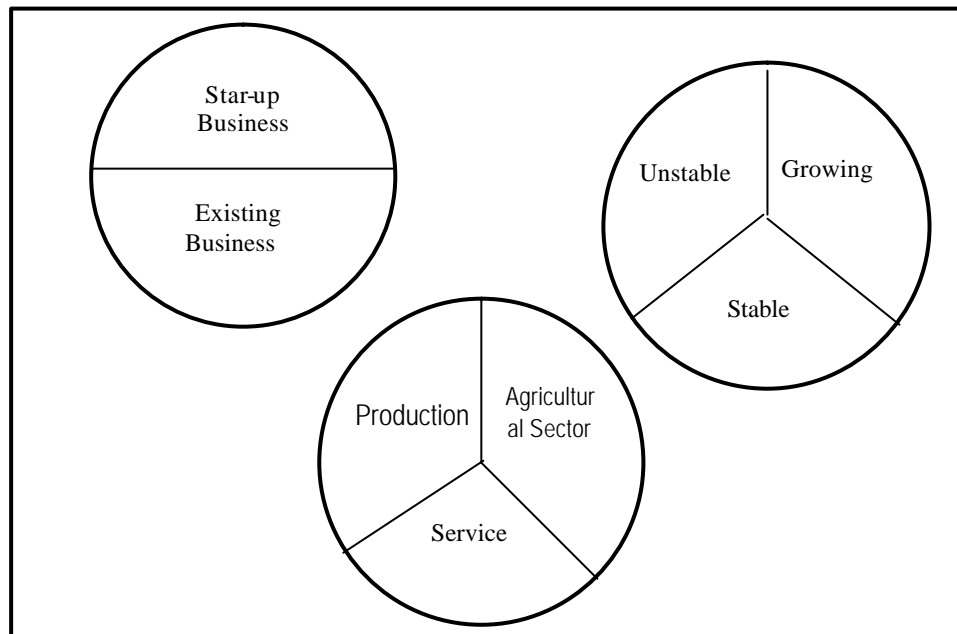
- a. Memiliki kekayaan bersih (*asset*) sampai dengan Rp. 25.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.125.000.000,-.
- b. Memanfaatkan sumber daya lokal, dan lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
- c. Berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak dengan usaha menengah atau besar.
- d. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berdasarkan hukum atau bukan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

2. Jenis Usaha Mikro

Ledgerwood (1999) mengemukakan bahwa untuk melayani usaha mikro, lembaga keuangan mikro sangat penting untuk mempertimbangkan jenis aktivitas dan tingkat perkembangan usaha tersebut. Apakah usaha tersebut *existing business* atau

star-up business; unstable, stable, atau growing; dan apakah termasuk dalam kegiatan pertanian, produksi atau layanan jasa (lihat Gambar 9).

Existing or Star-up microenterprises, ketika dilakukan identifikasi target market, microfinance institution (MFI) perlu mempertimbangkan apakah layanan akan menfokuskan pada usaha mikro yang sudah ada atau sudah melakukan aktivitas ekonominya (existing microenterprise) atau fokus pada usaha mikro yang potensi untuk dikembangkan (star-up microenterprise).



Gambar 9. Tahap Jenis Usaha Mikro

Sumber: Ledgerwood (1999).

Pada *existing microenterprises* umumnya hambatan yang dialami adalah masalah modal kerja (*working capital*). Untuk mengatasi masalah ini pengusaha umumnya meminjam dari sumber keuangan informal seperti dari keluarga, teman,

atau dari *money lender*. Bila bekerja dengan usaha yang telah beroperasi ini akan memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan mikro. Tentu saja bagi lembaga keuangan mikro dengan melihat kesuksesan dalam mengembangkan usaha dan menciptakan kesempatan kerja akan mengurangi tingkat resiko yang akan dialami oleh lembaga keuangan mikro.

Bila tujuan lembaga keuangan mikro adalah untuk pengentasan kemiskinan, maka dengan membantu *potential entrepreneurs* untuk memulai usaha mereka. Mereka akan dapat meningkatkan pendapatannya dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Hal yang menjadi pertimbangan bila target market lembaga keuangan mikro adalah *potential entrepreneurs* akan dibutuhkan layanan yang lebih memerlukan perhatian sebab kendala yang dialami oleh usaha tersebut lebih kompleks dibandingkan dengan usaha yang telah beroperasi. Kendala tersebut seperti kebutuhan investasi yang minim, tingkat teknologi, dan pasar yang belum jelas. Kebanyakan lembaga keuangan mikro lebih menfokuskan pada usaha yang telah beroperasi (*existing business*), hal ini dimaksudkan guna mengurangi resiko yang dialami oleh MFI.

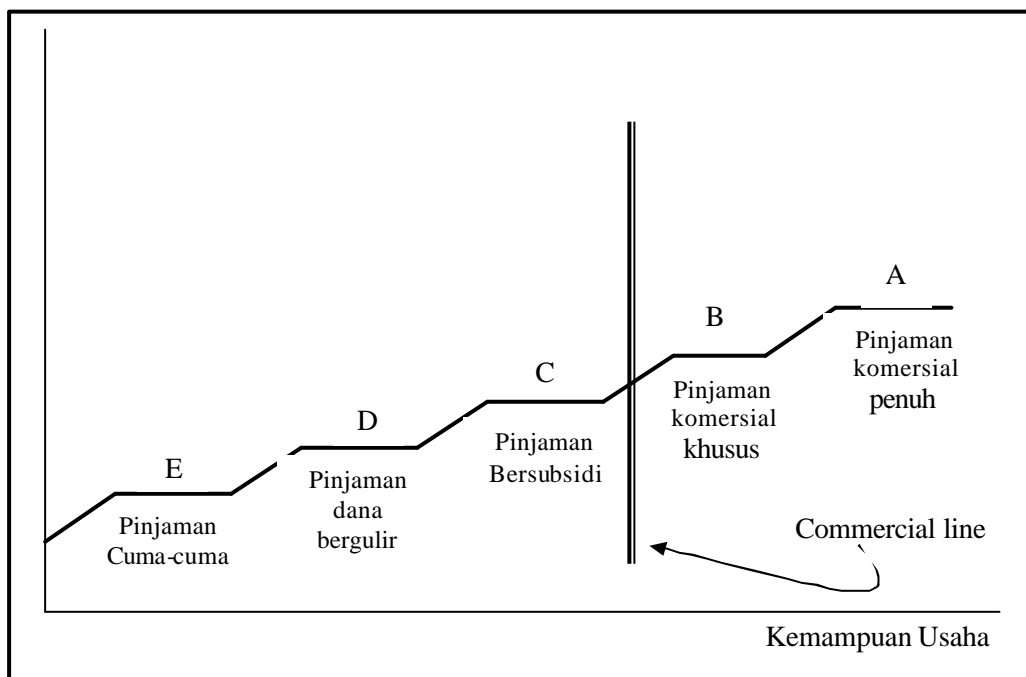
Level of business development, lembaga keuangan mikro perlu melihat tingkat perkembangan usaha dalam memberikan layanan keuangan. Tingkatan usaha yaitu *unstable, stable, dan growth enterprises*. Bagi lembaga keuangan mikro memberikan layanan kepada usaha yang belum stabil dibutuhkan waktu untuk memberikan layanan sampai suatu usaha berada pada kondisi dimana usaha tersebut mampu untuk mengembalikan pinjamannya.

Sering terjadi pada usaha yang belum stabil kredit yang dipinjamkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi daripada untuk kebutuhan yang dapat memberikan peningkatan pendapatan. Kebanyakan lembaga keuangan mikro fokus pada pembiayaan usaha yang sudah stabil, usaha yang sudah stabil memerlukan kredit untuk keperluan produksi dan konsumsi. Usaha yang telah mapan merupakan sasaran dari layanan keuangan mikro guna mengurangi kemiskinan. Kelompok usaha yang mengalami pertumbuhan menjadi fokus lembaga keuangan mikro dalam memberikan layanan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan usaha yang mengalami pertumbuhan dimungkinkan untuk beralih dari sektor informal ke sektor formal. Layanan lembaga keuangan mikro dapat berupa bantuan pemilihan produk baru, kredit modal kerja untuk jangka panjang, dan layanan konsultan marketing untuk mendapatkan pasar baru.

Jenis aktivitas usaha, salah satu pertimbangan lembaga keuangan mikro dalam memberikan layanan keuangan adalah sektor ekonomi yang digeluti. Secara umum bentuk usaha dapat dibagi ke dalam kegiatan pertanian, produksi, dan jasa. Setiap sektor ini memiliki tingkat resiko tersendiri dan kebutuhan keuangan yang berbeda. Tidak semua lembaga keuangan mikro menfokuskan pada layanan hanya pada sektor tertentu, akan tetapi kebanyakan lembaga keuangan mikro memberikan layanan kombinasi pada sektor-sektor kegiatan ekonomi tersebut. Secara umum direkomendasikan MFI menfokuskan pada sektor tertentu hingga usaha yang diberi layanan mengalami suatu perkembangan yang baik.

3. Pola pembiayaan dan kemampuan usaha

Sejak tahun 1984 BRI unit desa memasuki tahapan baru, dimana BRI unit desa tidak lagi berfungsi sebagai channeling bagi pemerintah dalam menyalurkan kredit, akan tetapi kredit yang disalurkan adalah kredit komersial, dimana pendekatan business disini sudah menonjol. Artinya bahwa kredit tersebut akan diberikan kepada pemohon didasari pada kelayakan usaha pemohon dan kemampuan untuk dapat mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga dalam hal ini pihak bank akan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.



Gambar 10. Pola Pembiayaan dan Kemampuan Usaha
Pada Bank Rakyat Indonesia

Sumber: Heru (2005).

Pada Gambar 10, menunjukkan pola pembiayaan yang dilakukan BRI. Bila dilihat dari sisi pembiayaan yang dilakukan oleh BRI, maka dapat dilihat bahwa BRI membedakan antara pinjaman yang sifatnya bersubsidi atau pinjaman yang sifatnya komersil. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada *comercial line*, pada sebelah kanan merupakan pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit komersil yang ditunjukkan pada point A dan B. Pada sebelah kiri merupakan bantuan yang mana peran pemerintah pada sisi sebelah kiri *commercial line* lebih dominan yaitu ditunjukkan pada point C, D, dan E.

Pada kredit komersil ini dibedakan pinjaman komersil khusus dengan pinjaman komersil penuh. Pinjaman komersil khusus ini merupakan pinjaman yang dilakukan pada BRI Unit yang dikenal dengan KUPEDES, dimana persyaratan yang dibutuhkan relatif lebih lunak, pemberian kredit mengutamakan hasil wawancara dengan nasabah yang kemudian menilai usaha yang dilakukan dan tidak menekankan pada catatan atau laporan keuangan.

Pinjaman komersil penuh merupakan pinjaman yang diberikan melalui cabang atau pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan besarnya pinjaman. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diberikan berdasarkan persyaratan pinjaman yang memerlukan catatan atau laporan keuangan lengkap, termasuk jaminan yang akan diberikan merupakan hal penting dalam pemberian kredit.

Pada bagian kiri *commercial line*, disini peran pemerintah lebih dominan dalam membantu masyarakat terutama pada bagian D dan E. Sedang pada bagian C, dapat dikatakan ini merupakan "semi komersil" dikatakan sebagai semi komersil sebab pinjaman yang diberikan merupakan kerjasama antara BRI dengan pemerintah.

Dalam rangka keikutsertaan BRI dalam pengembangan usaha kecil, maka pemerintah mewajibkan kepada pihak perbankan untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 1 % dalam rangka bina lingkungan. Dengan sumber dana tersebut BRI memberikan pinjaman sekaligus memberikan pembinaan terhadap suatu usaha agar dana yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan keuntungan yang berarti kepada para pengusaha.

Pinjaman yang diberikan dengan sumber dana dari dana bina lingkungan tidak sepenuhnya tingkat bunga pengembalian ditanggung oleh masyarakat sebagian oleh pemerintah melalui kerjasama dengan BRI. Jadi kalau bunga pinjaman sebesar 16%, maka masyarakat hanya mengembalikan tingkat bunga misalnya 11% selebihnya ditanggung oleh pemerintah bersama BRI melalui penyisihan keuntungan sebesar 1% dalam rangka bina lingkungan.

F. Teori utama dan paradigma kemiskinan

1. Teori utama kemiskinan

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu-kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun bila disederhanakan, setidaknya terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma *neo-liberal* dan *sosial demokrat* yang memandang kemiskinan dari individual dan kacamata struktural. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Teori Neo-Liberal dan Sosial Demokrat Terhadap Kemiskinan

	Neo-Liberal	Sosial Demokrat
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsepsi dan indikator kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab kemiskinan	Kelemahan dan pilihan-pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, bodoh, pasrah)	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; Ketidakadilan sosial.
Strategi penanggulangan kemiskinan	Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif; memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan	Penyaluran pendapatan dasar secara universal; perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara.
Prinsip	Residual. Dukungan yang saling menguntungkan.	Institusional. Redistribusi pendapatan vertikal dan horisontal; aksi kolektif

Sumber: Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998 (dalam Suharto, 2003)

Teori neo liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *the Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas *laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998) disebut sebagai ide yang menggugulkan “mekanisme pasar bebas”.

Secara garis besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan

sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran pemerintah tidak menonjol. Penerapan program-program structural adjustment, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.

Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum sosial demokrat. Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung sosial demokrat menyatakan bahwa *“a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation...a society is just when people’s needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated”* (Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998) (dalam Suharto, 2003).

Teori sosial demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran dan majemen ekonomi Keynesian ini, muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan

pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi manajemen-permintaan” (*demand-management economics*) gaya Keynesian ini.

Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*). Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki

kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Dirumuskan secara tajam, maka dapat dikatakan bahwa kaum neoliberal memandang bahwa strategi penanganan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya, pendukung sosial demokrat meyakini bahwa penanganan kemiskinan yang bersifat residual, berorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neoliberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum sosial demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya.

2. paradigma kemiskinan

a. Paradigma lama kemiskinan

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan sebuah kajian sebagai kebijakan dan program anti kemiskinan. Dewasa ini pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dan model yang berpusat pada produksi. Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan

indikator pembangunan tahun 1950-an, misalnya, para ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator "garis kemiskinan".

Pada 1990-an UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena mencakup bukan saja dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan pula pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup). Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada "paradigma pembangunan populis/kerakyatan" (Suharto, 1997).

Suharto (1997), mengemukakan baik paradigma modernisasi yang dipakai Bank Dunia maupun paradigma pembangunan populis yang digunakan UNDP masih menyimpan kelemahan. Keduanya masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada "kondisi" atau "keadaan" kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai "orang yang serba tidak memiliki": tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat.

Kedua perspektif tersebut masih belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Metodenya masih berpijak pada *outcome indicators*. Sehingga kurang memperhatikan aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Si miskin dilihat hanya sebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” (*human being*) yang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

b. Paradigma baru

Paradigma baru tidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apapun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Paradigma baru menekankan pada “apa yang dimiliki orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah yang telah dijalankannya secara lokal.

Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perlu dipertimbangkan:

- ? Pertama, kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya.
- ? Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga.

- ? Ketiga, konsep kemampuan sosial diandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
- ? Kempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa *key indicators* yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*) (Suharto, tanpa tahun).

G. Kemiskinan di Indonesia

1. Garis Kemiskinan di Indonesia

Dalam pengertian kemiskinan dikenal dengan kemiskinan pedesaan (*rural poverty*) dan kemiskinan perkotaan (*urban poverty*). Tetapi hal ini bukan berarti bahwa yang miskin adalah kota atau desa yang mengalami kemiskinan, tetapi penduduknya atau manusianya yang miskin. Jadi yang miskin adalah orang-orangnya, penduduk atau manusianya. Arsyad (1987) mengemukakan kemiskinan memiliki pengertian yang luas, namun yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut, konsep kemiskinan ini dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara laik. Bila pendapatan tidak dapat memenuhi

kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan.

Kemiskinan relatif yaitu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum. Namun apabila dibandingkan dengan keadaan masyarakat dilingkungannya masih lebih rendah, maka orang tersebut masih dalam keadaan miskin. Kondisi kemiskinan demikian ini sering disebut dengan kemiskinan relatif.

Berdasarkan konsep kemiskinan, maka dapat dikemukakan beberapa ciri atau tanda penduduk miskin adalah:

- a. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau

modal usaha. Semetra merekapun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain yang menyebabkan mereka berpaling ke lintas darat yang biasanya untuk pelunasannya diminta syarat yang berat dan bunga yang tinggi.

- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Biasanya waktu mereka habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar; atau karena harus membantu orang tuanya mencari tambahan penghasilan.
- d. Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah, walaupun ada relatif kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar sektor pertanian. Karena pertanian bekerja atas dasar musiman, maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (self employed) yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengungkung mereka selalu hidup dibawah garis kemiskinan (Prayitno dan Saloso, 1997).

Untuk membedakan antara yang miskin dan tidak miskin yaitu dengan melihat apakah seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau diatas garis kemiskinan. *Garis kemiskinan* merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum berupa makan, sandang, rumah, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Bila seseorang berada dibawah garis kemiskinan, maka dikatakan miskin.

Garis kemiskinan ini dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dan perubahan tingkat hidup masyarakat, maka garis kemiskinan juga ikut berubah dan cenderung terus meningkat. Garis kemiskinan membedakan antara kota dan desa, dan antara negara. Biro Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan penduduk miskin dan rumah tangga miskin, dengan batasan sebagai berikut:

a. Penduduk Miskin

- ? Penduduk dikatakan *sangat miskin* apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang perhari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 120.000,- per orang per bulan.
- ? Penduduk dikatakan *miskin* apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900 sampai 2100 kalori per orang perhari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 150.000,- per orang per bulan.
- ? Penduduk dikatakan *mendekati miskin* apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100 sampai 2300 kalori per orang perhari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 175.000,- per orang per bulan.

b. Rumah Tangga Miskin

Bila diasumsikan suatu rumahtangga memiliki jumlah anggota rumahtangga (*household size*) rata – rata 4 orang, maka batas kemiskinan rumah tangga adalah :

- ? Rumahtangga dikatakan *Sangat Miskin* apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar $4 \times \text{Rp. } 120 \text{ ribu} = \text{Rp. } 480 \text{ ribu}$ per rumahtangga per bulan.
- ? Rumahtangga dikatakan *Miskin* apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai $4 \times \text{Rp. } 150 \text{ ribu} = \text{Rp. } 600 \text{ ribu}$ per rumahtangga per bulan, tetapi diatas Rp. 480 ribu.
- ? Rumahtangga dikatakan *Mendekati Miskin* apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai $4 \times \text{Rp. } 175 \text{ ribu} = \text{Rp. } 700 \text{ ribu}$ per rumahtangga per bulan, tetapi diatas Rp. 600 ribu.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Di negara berkembang dewasa ini kemiskinan masih merupakan isu yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi sebab kemiskinan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dinegara berkembang. Sumber daya yang melimpah bukan jaminan bagi keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan. Banyak negara berkembang sumber daya alam cukup melimpah termasuk Indonesia namun kemiskinan juga belum dapat diatasi. Berbagai kebijakan telah dilakukan dalam rangka mengatasi kemiskinan dinegara berkembang, namun belum sepenuhnya kemiskinan teratasi sehingga penyebab kemiskinan dan cara mengatasinya masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Bila dilihat penyebab kemiskinan dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu *pertama*, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah

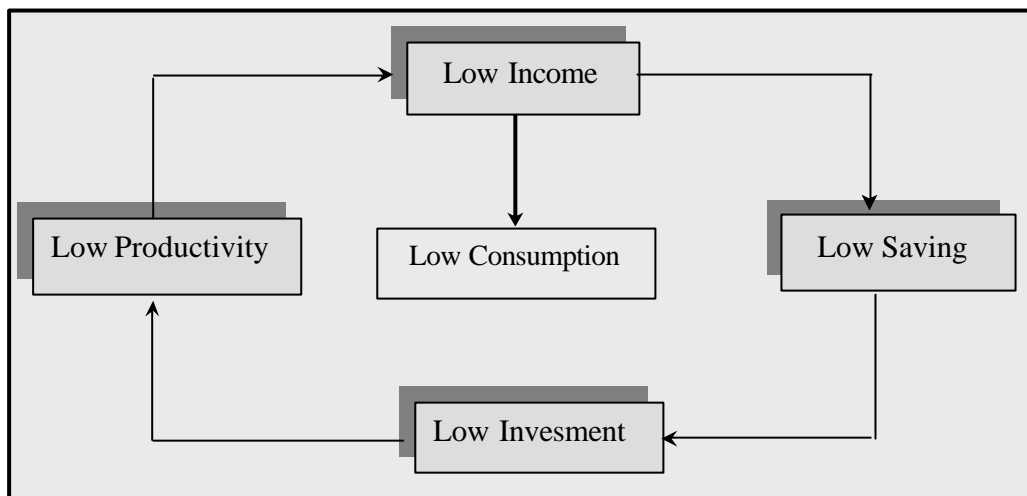
yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor non-alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak tepat (Subagio, et al., 2001).

Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan sangat penting untuk mengetahui penyebab kemiskinan sehingga penanganannya dapat memberikan hasil yang memuaskan, namun bila penanganan kemiskinan tanpa mengetahui *penyebab kemiskinan* kebijakan tersebut tidak akan membawa hasil yang optimal. Sebab banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, namun sangat sukar untuk menentukan faktor utama penyebab kemiskinan. Faktor tersebut seperti tingkat pendidikan yang rendah, kepemilikan lahan yang rendah, tabungan rendah, produktifitas yang rendah, tingkat upah rendah dan sebagainya.

Penyebab kemiskinan diawali dengan kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dan disertai dengan peralatan modal sederhana yang digunakan dalam melakukan aktivitas produksi sehingga tingkat produktivitas rendah menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan, akibat tingkat pendapatan yang rendah, tingkat konsumsi dan tabungan juga rendah berdampak pada investasi yang rendah.

Rendahnya investasi ini menyebabkan teknologi yang digunakan tidak berubah, tetap menggunakan teknologi sederhana dan investasi sumber

daya manusia juga tidak mendapat perhatian sehingga produktivitas kerja tetap rendah. Keadaan tersebut akan berlangsung terus tanpa ada ujung pangkalnya yang sering disebut sebagai lingkaran kemiskinan (*circles of poverty*) (Saubbotina, 2000). Lihat Gambar 11.



Gambar 11. Lingkaran Kemiskinan

Sumber: Saubbotina (2000).

3. Pengukuran Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Suatu rumah tangga dianggap miskin bila konsumsi perkapita rumah tangga tersebut berada dibawah ambang tertentu yang lebih dikenal sebagai garis kemiskinan. Sebagai ukuran agregat, tingkat kemiskinan suatu wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

Masyarakat miskin sering diasumsikan sebagai kelompok yang homogen, padahal pada kenyataannya mereka memiliki karakteristik yang heterogen, hal itu tergantung apakah mereka tinggal dikawasan kota atau desa, apakah bekerja pada sektor pertanian atau sektor industri, pembeda lainnya seperti usia, gender, tingkat pendidikan. Masyarakat miskin memiliki perbedaan dalam melepaskan diri dari kemiskinan. Mereka yang berpeluang tetap miskin dalam jangka panjang disebut miskin kronis, sedang mereka yang memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kemiskinan disebut sebagai miskin sementara (SMERU, 2001).

Beragam pengukuran terhadap batasan seseorang dikatakan atau digolongkan kedalam orang miskin atau kelompok miskin. Hasibuan (2003), mengemukakan beberapa pendekatan pengukuran kemiskinan:

1. Pendekatan *humanitarian* yang berlandaskan pada sejumlah barang dan jasa untuk mencukupi kehidupan individu, keluarga, ataupun kelompok. Tetapi hal itu belum menjelaskan kapan seseorang dikatakan dalam kondisi miskin atau miskin secara struktural. Lebih khusus lagi dinyatakan bahwa sejumlah barang dan jasa itu dapat mencukupi kebutuhan kalori minimum. Pendekatan ini cenderung bersifat absolut.
2. Pendekatan dengan menggunakan konsep *egalitarian* yakni seseorang dikatakan atau kelompok dikatakan miskin jika

pendapatannya masuk dalam kelompok bawah dalam distribusi pendapatan. Pendekatan ini cenderung bersifat relatif.

Kedua bentuk pengukuran tersebut memiliki kelemahan yang secara operasional untuk diterapkan pada suatu negara. Pengukuran kemiskinan di setiap negara memiliki perbedaan berdasarkan kondisi yang ada di negara tersebut. Beberapa konsep pengukuran kemiskinan sebagai berikut:

1. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai proksi. Misalnya pada tahun 1976 minimal pendapatan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari kategori miskin besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita perbulan di kota Rp 4.522, sedang di desa Rp 2.849. Pada tahun 2004 di perkotaan dibutuhkan Rp 143.455, sedang di pedesaan Rp 108.725. Perubahan ini disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat sehingga standar pengeluaran konsumsi juga berubah.
2. *World Bank* dengan menggunakan pendekatan pendapatan pada tahun 1990 tolok ukur kemiskinan yaitu dengan pendapatan \$ 1 /orang/hari. Pada tahun 2000 menjadi \$ 2 /orang/hari. Dengan kurs \$ 1 = Rp 8.500,- maka UMR bank dunia menjadi Rp. 2.193.000/orang/bulan. Bila tolok ukur kemiskinan yang digunakan Bank Dunia diterapkan di Indonesia maka akan semakin banyak jumlah orang miskin di Indonesia dibandingkan bila diterapkan tolok ukur yang dikeluarkan oleh BPS.

3. Sajogyo (1977:dalam Arsyad, 1987) menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita pertahun sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg perkapita pertahun digolongkan miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan 360 kg perkapita pertahun. Perbedaan ini banyak faktor yang membedakannya terutama faktor biaya hidup yang membedakan antara di perkotaan dan di pedesaan.

4. Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Persoalan kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena hingga sekarang ini belum dapat diatasi walaupun pembangunan ekonomi menunjukkan adanya kemajuan sejak tahun 1970. Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup berarti ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pendapatan perkapita yang terus mengalami peningkatan. Namun penduduk yang hidup dibawah garis kemiskin di Indonesia masih cukup tinggi, pada tahun 1996 sebelum krisis ekonomi mencapai 22,5 juta jiwa atau 11,3% dari penduduk Indonesia, ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 2002 telah menunjukkan angka 38,4 juta jiwa atau 18,2 % dari total penduduk Indonesia

Menangani kemiskinan memang menarik untuk disimak. Teori ekonomi mengatakan untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi, dan pengembangan teknologi. Melalui

berbagai suntikan maka diharapkan produktivitas akan meningkat. Namun kenyataannya dalam praktek tidak mudah itu untuk dilakukan atau memutus lingkaran kemiskinan.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia telah mendapat perhatian yang cukup serius ketika pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), tabungan keluarga sejahtera dan kredit keluarga sejahtera, kemitraan bersama antara usaha kecil-menengah-besar, dan juga program pengembangan kawasan terpadu (PKT) merupakan salah satu program yang dirancang khusus untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah-daerah yang relatif tertinggal karena belum tersentuh oleh program-program pembangunan.

Program IDT yang dilaksanakan secara resmi tahun 1994 memiliki tiga tujuan utama: *pertama*, untuk memicu dan menggalakkan gerakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan; *kedua*, mengurangi disparitas ekonomi dan sosial di dalam masyarakat; dan *ketiga*, mengaktifkan kembali ekonomi rakyat dengan pemberdayaan kaum miskin (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya Inpres yang dikeluarkan sebelum krisis ekonomi, akan tetapi saat krisis ekonomi pemerintah lebih menfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dengan membentuk *Komite Penanggulangan Kemiskianan (KPK)* pada tahun 2001. KPK ini dibentuk guna mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan yang berfungsi

sebagai wadah koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan lintas sektoral dan lintas regional. Untuk penanggulangan kemiskinan KPK menetapkan *pemberdayaan masyarakat* sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya, yaitu:

a. Upaya pengurangan beban masyarakat miskin dilakukan melalui penajaman alokasi APBN, melalui

1) Bantuan langsung masyarakat (BLM) dengan melakukan tiga pemberdayaan yaitu pada *usahanya* yang berupa bantuan teknis untuk permodalan dan pendampingan, pada *manusianya* yaitu berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kesehatan; dan pada *lingkungannya* yang berupa sarana-prasarana pendukung usaha atau kegiatan produktif masyarakat miskin.

2) Bantuan Operasional Pembangunan (BOP) kepada departemen/instansi terkait untuk melakukan pembinaan teknis yang diterapkan kepada pembinaan pada manusianya, usahanya, kelembagaannya, monitoring evaluasi dan pengendaliannya.

b. Upaya peningkatan prduktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan (Sumodiningrat, 2003).

Pada dasarnya kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijaksanaan yang tidak langsung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kebijaksanaan yang langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan (Prayitno dan Saloso, 1997).

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksud antara lain adalah suasana sosial politik yang tenteram, ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang. Upaya pengelolaan ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan perpajakan merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Pengendalian inflasi merupakan bagian penciptaan kondusif bagi upaya penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dengan harga terjangkau oleh penduduk miskin.

Kebijaksanaan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta dan produktivitas sumber daya manusia, khusus untuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam hubungan penanggulangan kemiskinan Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK)

untuk turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Dimana peranan Bank Indonesia bersifat tidak langsung sesuai dengan *UU No.23 tahun 1999*, Bank Indonesia tidak lagi dimungkinkan untuk memberikan kredit likuiditas. Adapun bentuk bantuan Bank Indonesia melalui tiga pilar strategi yaitu:

1. Kebijakan kredit perbankan
2. Pengembangan dan penguatan kelembagaan
3. Pemberian bantuan teknis (KPK, 2002).

Di bidang *kebijakan kredit perbankan*, Bank Indonesia mendorong bank-bank untuk menyelurkan kredit usaha kecil dan mencantumkannya dalam business plan serta melaporkannya dalam laporan keuangan publikasi sehingga masyarakat dapat menilai bank-bank yang berpihak kepada pengembangan usaha kecil. Bank Indonesia juga terus mendorong kerjasama (*linkage program*) antara bank umum dengan bank perkereditan rakyat (BPR) dalam rangka penyaluran kredit kepada usaha mikro, mendukung pembentukan unit layanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kantor cabang bank dan menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dari sisi *pemberian bantuan teknis*, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pelatihan kepada staf perbankan, penelitian dan penyediaan informasi kepada sektor perbankan. Dari sisi penyediaan informasi,

Bank Indonesia juga telah mengembangkan sistem informasi pengembangan usaha kecil (SIPUK) sebagai sarana penyedia informasi bagi UMKM yang potensial, melakukan penelitian potensi dasar ekonomi daerah dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank (*lending model*).

Dalam hal *pengembangan dan penguatan kelembagaan*, Bank Indonesia melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPR yang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, mendorong terbentuknya lembaga pelatihan dan konsultasi BPR serta mengkaji kemungkinan menetapkan standar teknologi informasi bagi BPR. Dalam rangka mengembangkan infrastruktur perbankan dan terus menyempurnakan sistem informasi debitur guna membantu bank memperoleh akses informasi mengenai calon nasabah.

Penanggulangan kemiskinan sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah telah membuat program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya membantu masyarakat secara langsung yang membutuhkan mengingat meurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran. Program tersebut seperti:

a. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) program ini bermaksud:

- 1) Untuk memberikan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin;

- 2) Memberikan peluang kerja produktif yang dapat memperbaiki daya beli masyarakat miskin.
- 3) Memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin;
- 4) Memulihkan jasa-jasa sosial dan ekonomi masyarakat miskin; dan
- 5) Memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat miskin. (Bappenas, 1999)

Program ini mencakup empat aktivitas sebagai berikut:

- (a) Program keamanan pangan;
- (b) Program pendidikan perlindungan sosial;
- (c) Program kesehatan dan perlindungan sosial; dan
- (d) Program pekerjaan umum padat karya.

Program keamanan pangan , dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang lebih baik terhadap makanan dalam harga dan kesedian. Program ini mencakup; pertama, bantuan makanan melalui operasi pasar terbuka (OPK) yaitu dengan menjual beras dengan harga relatif murah Rp. 1000 per KG, setiap keluarga bisa mendapatkan 20 KG perbulan. Kedua, memperbaiki ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan para petani.

Program pendidikan perlindungan sosial adalah untuk memelihara jasa pendidikan kepada keluarga miskin, seperti pemberian beasiswa, bantuan keuangan operasional, dan rehabilitasi gedung

sekolah dasar dan pembangunan gedung baru. *Dalam sektor kesehatan*, semua anggota keluarga miskin, menerima jasa kesehatan pada pusat kesehatan secara cuma-cuma. Mereka juga menerima nutrisi tambahan terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak (termasuk bayi). Makan tambahan juga diberikan di sekolah dan rumah yatim piatu. *Program pekerjaan umum padat karya* dirancang untuk membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli mereka. Dengan merancang proyek yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak seperti proyek perbaikan fasilitas jalan perkampungan dengan menggunakan banyak tenaga kerja.

- b. Program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE). Program ini diluncurkan di semua desa di seluruh Indonesia. Menurut skim ini, pemerintah pusat memberikan anggaran langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan jumlah keluarga miskin dan jumlah pengangguran di desa mereka masing-masing (Remi dan Chiptoherijanto, 2002).

H. Beberapa Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengaruh microfinance terhadap pengentasan kemiskinan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Madajewicz (2003) mengenai dampak pinjaman kredit program terhadap kemiskinan di Banglades. Kredit ini merupakan kredit mikro yang berkaitan dengan usaha kecil. Penelitian tersebut dilakukan pada tiga bank yang menyediakan kredit mikro, yaitu *Grameen Bank*, *The Banglades Rural Advanced Committee (BRAC)*, *Banglades Rural Development Board's (BRDB)*. Kredit diberikan hanya pada kelompok peminjam kredit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kredit program memberikan dampak yang positif bagi peningkatan keuntungan usaha terutama bagi peminjam yang memiliki lahan lebih besar 1,5 are, sebaliknya tidak memberikan dampak positif bagi peminjam yang memiliki lahan kurang dari 1,5 are. Estimasi juga dilakukan apakah kredit mikro yang dipinjamkan dapat mempengaruhi asset usaha dan modal kerja (*working capital*). Hasil penelitian menunjukkan adanya efek positif terhadap peningkatan asset dan modal kerja. Madajewicz, juga mengemukakan bahwa dampak lebih luas yang ditimbulkan dengan adanya kredit mikro adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin hal tersebut ditandai dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja, barang dan jasa, dan menjadi pendorong ekonomi masyarakat.
2. Khandker dan Faruqee (2001) melakukan penelitian mengenai dampak kredit pertanian di Pakistan. Penelitian ini untuk melihat dampak pemberian kredit oleh *Agricultural Development Bank of Pakistan (ADBP)* di daerah pedesaan. Kredit yang ada dipedesaan

adalah kredit formal dan informal. Kredit formal terutama didominasi oleh ADBP meskipun ada dari bank komersial lainnya. Formal kredit sebagian besar digunakan untuk kegiatan produksi sebesar 95%, sementara hanya 5% digunakan untuk tujuan konsumsi. Sebaliknya, informal kredit sebagian besar digunakan untuk tujuan konsumsi 56%. Selebihnya sebesar 44% digunakan untuk tujuan produksi. Hasil studi ditemukan bahwa kredit yang diberikan kepada para petani menunjukkan adanya pertumbuhan produksi dan kenaikan pendapatan. Hal tersebut dimungkinkan karena pinjaman tersebut digunakan untuk mensuport biaya kebutuhan produksi seperti pembelian bibit, pupuk, menyewa tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya kredit tersebut produksi meningkat. Selain itu, kredit memberikan dampak bagi penawaran tenaga kerja wanita yang lebih besar.

3. Khandker (2003), mengemukakan dampak jangka panjang keuangan mikro terhadap konsumsi rumah tangga dan kemiskinan dengan menggunakan panel data dari hasil survey. Dalam penelitian tersebut dikemukakan pertama, apakah penduduk miskin yang mengalami kekurangan *physical* (seperti tanah) dan *human capital* (seperti pendidikan) turut berpartisipasi dalam program keuangan mikro; Kedua, melihat dampak keuangan mikro terhadap kemiskinan; ketiga, untuk melihat dampak *aggregate microfinance* apakah menolong

penduduk miskin yang terlibat dalam program tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa keuangan mikro meningkatkan konsumsi perkapita penduduk miskin terutama konsumsi pada *non-food*, hal yang serupa juga pada household yang tidak memiliki asset tanah. Kenaikan ini dimungkinkan penduduk miskin yang terlibat dalam program keuangan mikro terhindar dari kemiskinan. Dampak keuangan mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga diindikasikan dengan adanya distribusi pendapatan yang lebih baik pada pertumbuhan pendapatan masyarakat desa. Hal lain yang dikemukakan bahwa program keuangan mikro menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dan kesejahteraan mereka meningkat, sehingga program keuangan mikro dapat mengurangi penduduk yang sangat miskin (*the extreme poor*).

4. Vogelgesang (2001) melakukan penelitian dampak keuangan mikro terhadap enterprise di Bolivia. Penelitian ini ingin melihat dampak keuangan mikro terhadap produktivitas dan pertumbuhan usaha. Hasil penelitian keuangan mikro memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan usaha.
5. Barnes et al. (2001) melakukan penelitian dampak tiga program keuangan mikro di Uganda. Ketiga program keuangan mikro yaitu *Foundation for International Community assistance (FINCA)* in

Campala, *Foundation for Credit and Community Assistance (FOCCAS)* in rural Mbale, dan *Promotion of Rural Initiatives and Development Enterprises (PRIDE)* in Masaka. Survey dilakukan pada level perusahaan dan level rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan dampak pada level perusahaan adanya kenaikan produksi, mengurangi biaya karena pembelian input dalam jumlah banyak, meningkatnya persediaan (*stock*), volume penjualan mengalami peningkatan, dan meningkatkan pendapatan bersih. Sebagai dampak meningkat keuntungan usaha memberikan pengaruh pada level rumah tangga. Dari hasil keuntungan usaha digunakan bagi kebutuhan rumah tangga untuk pembelian asset barang tahan lama, menambah pendapatan rumah tangga. Dapat dikemukakan bahwa dari hasil penelitian tersebut pinjaman digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, sehingga keuntungan dapat meningkat. Meningkatnya keuntungan usaha memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, sebab sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

6. Pitt et. al. (2003) melakukan penelitian dampak partisipasi wanita dan pria dalam kelompok program kredit mikro dengan menggunakan data dari hasil survey yang dilaksanakan di Banglades. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi wanita dalam *micro credit* dapat meningkatkan pemberdayaan wanita. Program kredit membantu

wanita dalam mengambil peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga, wanita memiliki akses yang lebih besar pada sumber daya keuangan dan ekonomi, memiliki jaringan sosial yang lebih luas, mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelum terlibat dalam kredit program, dan adanya kecenderungan komunikasi yang lebih baik antara suami istri dalam penggunaan program keluarga berencana. Sementara pengaruhnya terhadap pria memiliki efek negatif dalam hubungannya dengan pemberdayaan wanita, dan adanya kekuasaan dalam mengatur beberapa transaksi dalam rumah tangga.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Kebijakan pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja (*employment*) yang lebih luas sehingga tingkat pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi (*growth*), stabilitas harga terjamin karena keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa, keseimbangan neraca pembayaran luar negeri, dan tingkat kemiskinan yang rendah.

Di negara sedang berkembang umumnya menghadapi tingginya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini merupakan dampak dari aktivitas pembangunan ekonomi yang tidak merata. Masalah kemiskinan sampai saat ini masih merupakan masalah yang mendapat perhatian cukup besar dari negara sedang berkembang termasuk Indonesia dan lembaga-lembaga internasional yang peduli dengan masalah kemiskinan.

Khandker (1997) berpendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah karena tingginya tingkat pengangguran (*unemployment*), rendahnya produktivitas dan rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi pengangguran maka dibutuhkan penciptaan lapangan kerja baru (*creating jobs*), sedangkan untuk mengatasi rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan dibutuhkan investasi pada sumber daya manusia dan investasi